

KONFLIK KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT & RUSIA PADA KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN 1992–2020

Bintang Surya Dharma
Universitas Abdurrahman
Bintangsurayadharm@univrab.ac.id

Abstrak

Uni Soviet pada tahun 1923 yang di pimpin oleh Joseph Stalin, secara sengaja memasukan daerah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah bagian Soviet Azerbaijan (Republik Sosialis Soviet) yang mana pada masa lampau merupakan kekuasaan kerajaan Artsakh Armenia. Peristiwa inilah kemudian yang menjadi awal terjadinya sengketa wilayah kedua negara antara Armenia dan Azerbaijan. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai konsep relevan, terutama konsep Geopolitik yang belum ditemukan pada penelitian sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah dan Dinamika konflik antara Armenia dan Azerbaijan Kebijakan Resolusi AS – Rusia dan menjelaskan Konflik Kepentingan antara AS dan Rusia Pada Armenia dan Azerbaijan. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, Amerika Serikat dan sekutu lebih condong berpihak pada Azerbaijan, karena Azerbaijan dinilai menguntungkan secara ekonomi dengan cadangan minyak nya yang besar, secara geostrategi dan geopolitik, AS dan Sekutu memandang Azerbaijan dapat menjadi *counter* yang tepat di Asia Tengah untuk meredam pengaruh dominasi Rusia di kawasan Kaukasus. *kedua* Sebaliknya, Rusia lebih condong berpihak pada Armenia, Karena keterkaitan kuat terutama politik, ekonomi dan militer. Pangkalan militer Rusia di Gyumri Armenia, Impor minyak dan gas alam dari Rusia ke Armenia dan Alutsista dan peralatan militer Armenia sebagian besar adalah produk militer Rusia. Namun Rusia dalam proses nya, tetap mengutamakan kebijakan luar negeri yang bersahabat pada kedua negara berkonflik dikarenakan dalam sisi geografis dan histerisis, kedua negara merupakan pecahan Uni Soviet. *ketiga* kurang efektifnya OSCE Minsk Group yang menjadi media/wadah penyelesaian konflik kedua negara dikarenakan konflik kepentingan negara-negara di dalamnya, terutama AS dan Rusia. Sesuai dengan teori geopolitik daerah pinggiran (Rimland) oleh Nicholas Spykman dengan diktum, konflik kepentingan AS dan Rusia di kawasan Kaukasus Selatan (Eurasia) merupakan teori yang tepat untuk menjelaskan dan menjabarkan penelitian ini.

PENDAHULUAN

Pasca perang dingin, sistem *Bipolar* dunia berubah menjadi *Unipolar* dengan hanya ada satu kekuatan hegemoni dunia yaitu Amerika Serikat. Persetaraan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia) telah berubah dalam banyak hal. Daerah Administratif Khusus paska runtuhnya Uni Soviet yang dikenal dengan nama Nagorno-Karabakh merupakan inti masalah baru yang muncul sebagai bentuk *vis a vis* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masalah yang timbul saat ini tidak terlepas dari sejarah yang membentuknya. Dimana pada saat Uni Soviet berkuasa, untuk memuluskan kekuasaannya di kaukasus selatan maka Uni Soviet melakukan sebuah sistem perpecahan atau pada masa belanda di Indonesia dikenal dengan istilah “*devide et impera*” (Sutiono, 2014, p. 1)

Uni Soviet pada tahun 1923 yang di pimpin oleh Joseph Stalin, secara sengaja memasukkan daerah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah bagian Soviet Azerbaijan (Republik Sosialis Soviet) yang mana pada masa lampau merupakan kekuasaan kerajaan Artsakh Armenia. Peristiwa inilah kemudian yang menjadi awal terjadinya sengketa wilayah kedua negara antara Armenia dan Azerbaijan. Usaha-usaha untuk merdeka dari kekuasaan Uni Soviet terus dilakukan sejak 1923. Namun, perlawanan mulai membuahkan hasil pada akhir 1980-an. Pada tahun 1988, kebijakan Rekstrukturisasi Ekonomi oleh Michael Gorbachev yang di kenal dengan nama (*Glasnost & Perestroika*) memberikan otonomi khusus bagi negara-negara yang dikuasainya untuk meningkatkan ekonominya. Kesempatan ini tidak disia-siakan kelompok separatis untuk menghimpun kekuatan karena ternyata wilayah-wilayah kekuasaan Soviet di tempat lain juga melakukan perlawanan yang sama untuk terlepas dari kekuasaan Uni Soviet. Sehingga melemahnya kontrol

terhadap negara-negara satelitnya membuat Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1991. (Sutiono, 2014, p. 2)

Perang yang terjadi antara kedua Negara semakin meningkat pasca diturunkannya pasukan militer Azerbaijan untuk mengamankan wilayah yang 90% dihuni oleh orang-orang Armenia yang ingin merdeka sebagai sebuah bangsa sendiri dikarenakan statusnya sebagai wilayah otonom oleh kekuasaan Uni Soviet sebelumnya.

Posisi geografis kedua negara juga menjadi sesuatu yang sangat menarik dunia internasional untuk terlibat dalam konflik ini. Kedua negara ini berada dalam jalur sutra yang sering di sebut dalam teori Mackinder. Sebuah wilayah yang disebut-sebut sebagai jantung dunia, di mana kedua negara berada dalam kawasan yang menghubungkan secara darat antara Eropa Timur dan Asia Utara, yaitu dua benua dengan kekuatan besar di dunia.

Asia Tengah yang terkenal dengan laut kaspianya yang bertetangga langsung dengan Azerbaijan-Armenia merupakan *region* yang menjadi kepentingan utama bagi negara-negara besar ketika Nicholas J.Spykman menempatkannya sebagai wilayah pinggiran (*Rimland*) Revisi dari (*Heartland*) Mackinder, yang sangat strategis. Dalam teorinya, Nicholas J. Spykman menjelaskan: “(*Who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destinies of the world*)”

“barangsiapa menguasai Rimland akan mengendalikan Eurasia, mereka yang menguasai Eurasia, akan mengendalikan takdir dunia”

Negara besar yang menginginkan kawasan tersebut sebagai contohnya ialah Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat dalam hal ini memiliki kepentingan minyak yang besar terhadap negara-negara kawasan Eurasia dikarenakan adanya dorongan kebutuhan konsumsi Amerika Serikat akan minyak yang semakin

meningkat. Sebagai contoh pada tahun 1991 saja, Amerika Serikat mengkonsumsi hingga 7 juta barrel per harinya. (Goggle e-Book: “ Gelombang Revolusi Energi)

Eksistensi dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Rusia di wilayah yang kurang dikenal tentu memiliki makna. Kepentingan sumber daya alam di daerah konflik Armenia dan Azerbaijan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena terletak di wilayah pegunungan Kaukasus, yang kaya akan sumber daya mineral, dan berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Kaspia, serta kaya akan gas alam dan minyak. Kedua negara melakukan pendekatan untuk memenuhi kepentingan masing-masing dan memiliki cara tersendiri dalam melakukan pendekatan. Rusia melakukan pendekatan ke Armenia dalam usaha memenuhi kepentingannya. Rusia menjadi penyangga dari sektor strategis ekonomi Armenia dengan menyediakan pasokan seperti gas alam, jalur kereta dan listrik. Rusia membangun pipa gas dari Armenia ke Iran melalui perusahaan gasnya, Gazprom. (Sutrisna, 2021, p. 5)

Amerika Serikat melakukan pendekatan pada Azerbaijan bahkan dengan lebih terbuka. Pada masa pemerintahan Presiden Clinton, Amerika Serikat menyatakan bahwa Azerbaijan dan wilayah Kaukasus Selatan merupakan faktor penting Amerika Serikat dalam menjalankan strategi *New Silk Road*. Pipa minyak Baku-Tbilisi-Ceyhan adalah salah satu bukti ketertarikan Amerika Serikat pada Azerbaijan. (Sutrisna, 2021, p. 6)

Ketertarikan akan Eurasia juga semakin bertambah dikarenakan pada saat perang dingin negara-negara di wilayah ini merupakan negara-negara *bufferzone*. Yaitu sebuah wilayah penyangga yang menjadi alat untuk uji kekuatan dan teknologi dari kedua negara yang saling berkompetisi, antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh mulai dari Azerbaijan, Armenia dan negara-negara anggota Minsk Group memiliki

kepentingannya sendiri. Hal ini menimbulkan gesekan kepentingan yang secara tidak langsung berpengaruh pada proses pengelolaan konflik Nagorno-Karabakh. Rusia selaku salah satu ketua Minsk Group yang memfasilitasi dialog juga sebagai pemimpin di kawasan mendukung pengelolaan konflik Nagorno-Karabakh untuk masuk dalam *status quo*. Mengacu pada realitas yang ada, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan makna bahwa penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dua kekuatan besar terlibat belum tentu membantu dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis dinamika konflik Armenia – Azerbaijan dan konflik kepentingan Amerika Serikat dan Rusia dalam konflik Armenia - Azerbaijan 1992-2020.

STUDI LITERATUR

Kajian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tujuan kajian terdahulu adalah untuk membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Penelitian pertama yaitu skripsi dari Ragilang Hanendra Putra tahun (2015) yang berjudul “Peran Rusia Dalam Menangani Konflik Sengketa Wilayah Nagorno – Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan Periode 2010 – 2013” Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Rusia dan OSCE Minsk Group dalam menangani konflik kedua Negara. Hasil dari penelitian ini adalah Rusia secara aktif dan positif terlibat dalam mediasi namun di sisi lain juga menjadi aktor yang berpotensi memicu ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan. Rusia telah memfasilitasi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan bahkan dengan menjadi mediator yang paling aktif memfasilitasi sejak tahun 2010. Beberapa negosiasi yang difasilitasi oleh Rusia juga

menghasilkan beberapa kesepakatan yang mendukung perkembangan resolusi konflik seperti *Confidence Building Measure* (CBM). Rusia mendukung adanya status quo untuk menjaga regional Kaukasus Selatan di bawah pengaruhnya. Persepsi negatif terhadap peran Rusia tidak hanya didukung oleh alasan kepentingan geopolitik Rusia, tetapi juga terjadinya perang Rusia-Georgia tahun 2008. Posisi Rusia sebagai pemain dalam dinamika konflik

Nagorno – Karabakh dapat dilihat dari level geopolitik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara geopolitik, Rusia dipandang mengambil keuntungan dalam “status quo” konflik ini. Melalui partisipasi Armenia dalam CSTO (*Collective Security Treaty Organization*), Rusia dapat meraih keuntungan melalui kerjasama yang terjadi, seperti penempatan pangkalan militernya yang terus diperpanjang hingga 2044 di Armenia.

Penelitian kedua, yaitu penelitian dari Rindy Dwi Liaska tahun (2020) yang berjudul “ Peran OSCE dalam menyelesaikan Konflik Nagorno – Karabakh” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah Kegagalan OSCE Minsk Group di dasari oleh beberapa faktor yaitu terbagi menjadi enam yakni saling tidak percaya, adanya kesalahpahaman, ketidakstabilan, jumlah pengungsi, waktu, hukum internasional pada konflik tersebut dan adanya intervensi. Dan kegagalan OSCE Minsk Group pun didasari oleh kekurangan yang dimiliki OSCE Minsk Group yakni adanya perbedaan pola pikir, kredibilitas dari negara ketua terutama (Amerika dan Rusia) ,inkonsistensi pada prinsip, proses negosiasi yang tidak seimbang, tidak transparan serta berubah-ubahnya struktur organisasi, dan kurangnya jaminan keamanan. Namun faktor yang paling utama kegagalan OSCE Minsk Group adalah perbedaan kepentingan antara Amerika serikat dan Rusia.

Penelitian ketiga, oleh Sutiono tahun (2015) yang berjudul “ Peran Amerika Serikat dalam menengahi Konflik Azerbaijan dan Armenia”. Metode Penelitian ini adalah deskriptik-analitik, jenis data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisa deduktif yang memaparkan secara khusus setiap variabelnya dan saling keterkaitan dan pengaruh antar variable. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah Internasionalisasi konflik melalui berbagai pihak tidak hanya oleh Amerika Serikat, namun beberapa negara lain pun ikut terlibat ataupun menawarkan diri untuk terlibat seperti Rusia, Iran, Turki, dan Prancis. Realitas kedua negara yang termasuk dalam keanggotaan PBB dan juga sebuah organisasi regional yang berfokus pada kerjasama dan keamanan wilayah di antara negara-negara Eropa yaitu *Organization on Security and Cooperation of European (OSCE)* semakin membuat internasionalisasi konflik ini semakin luas. Namun, kehadiran pihak-pihak dari dunia internasional memberikan solusi yang tidak konkrit disebabkan para pihak yang terlibat justru pihak-pihak yang memiliki kompetisi kepentingan di wilayah tersebut, sehingga kehadirannya semata-mata hanya untuk mengamankan kepentingannya dari kedua pihak yang bertikai. salah satu contohnya adalah kehadiran Amerika Serikat di dalam konflik Azerbaijan ini adalah dalam rangka menghilangkan pengaruh dari Rusia sebagai representasi dari pandangan sosialis dari Uni Soviet. Begitu pula Rusia yang hadir di dalam konflik ini demi ingin terus menguatkan pengaruhnya di bekas negara-negara satelit Uni Soviet karena kepentingan ekonomi yang besar seperti jalur perdagangan minyak yang direpresentasikan oleh jalur pipa minyak Novoschick. Perbedaan kepentingan oleh pihak-pihak luar yang terlibat semakin memperparah konflik, dikarenakan keberpihakan pihak luar dapat menambah eskalasi konflik seperti bantuan alat-alat perang oleh Amerika Serikat bagi Azerbaijan, dan alat-alat perang Rusia bagi

Armenia. Menurut Mochtar Mas'oeed (1998), metode penelitian berbicara tentang bagaimana cara memperoleh, memahami data dan fakta yang ditempuh melalui pengamatan, wawancara, penggunaan data kuantitatif, data kualitatif dan bahan dokumen. Oleh karena itu untuk menguji suatu penelitian maka dibutuhkan suatu metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah menafsirkan suatu penelitian seperti asumsi/dugaan, nilai, dan pendapat dari peneliti sehingga menjadi jelas dalam hasil akhir suatu penelitian.

METODE PENELITIAN

Menurut Mochtar Mas'oeed (1998), metode penelitian berbicara tentang bagaimana cara memperoleh, memahami data dan fakta yang ditempuh melalui pengamatan, wawancara, penggunaan data kuantitatif, data kualitatif dan bahan dokumen. Oleh karena itu untuk menguji suatu penelitian maka dibutuhkan suatu metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah menafsirkan suatu penelitian seperti asumsi/dugaan, nilai, dan pendapat dari peneliti sehingga menjadi jelas dalam hasil akhir suatu penelitian.

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Dinamika Konflik Nagorno – Karabakh

Sejarah Nagorno – Karabakh sudah ada jauh sebelum negara Armenia dan Azerbaijan terbentuk. Nagorno – Karabakh sering diakui oleh orang-orang Armenia yang tinggal di sekitar Artsakh (Nama ibu kota Nagorno – Karabakh masa lampau). Nagorno – Karabakh merupakan provinsi ke sepuluh dari kerajaan Armenia di masa lampau. Dalam dokumen bangsa Urart (abad 9-7 sebelum masehi) nama Urart kini digunakan untuk wilayah tersebut. Dokumen bangsa Urart tersebut merupakan

dokumen kuno Yunani yang menyebut wilayah Nagorno – Karabakh sebagai *Orkhistene* (Sutiono, 2014, p. 76).

Menurut Pemerintah Republik Nagorno – Karabakh yang berdiri sejak 10 Desember 1991, konflik dan status Nagorno – Karabakh saat ini berakar pada keputusan yang dibuat oleh Joseph Stalin dan Biro Kaukasus (*Kavburo*), saat Sovietisasi Transkaukasus. Stalin yang menjadi Komisioner Nasional untuk Uni Soviet pada awal 1920-an memiliki cabang wilayah yang disebut *Kavburo*. Setelah Revolusi Rusia 1917, Karabakh menjadi bagian dari Republik Federasi Demokrasi Transkaukasus, tapi kemudian segera dibagi menjadi beberapa negara yaitu Azerbaijan, Armenia dan Georgian. Nagorno-Karabakh kemudian masuk di dalam wilayah Azerbaijan dua tahun setelah itu 1918-1920 (Sutiono, 2014, p. 77).

Pada Juli 1918, Dewan Utama Orang-Orang Armenia di Nagorno – Karabakh mendeklarasikan pemerintahan sendiri dan menciptakan sebuah Dewan Nasional dan membentuk pemerintahan, kemudian, pasukan Ottoman memasuki Karabakh, dan bertemu pasukan pertahanan oleh orang-orang Armenia yang 94% menduduki wilayah tersebut berdasarkan sensus 1921.

Kekalahan Turki Ottoman pada perang dunia I, berimbas juga pada pasukan Inggris yang kemudian menduduki Karabakh. Kerajaan Inggris kemudian menunjuk Koshrov Bey Sultanov yang disarankan oleh pemerintah Azerbaijan sebagai Gubernur Jenderal Karabakh sekaligus menunda keputusan akhir dari konferensi Kemerdekaan Paris. Keputusan tersebut ditentang oleh orang-orang Armenia di Karabakh. Di Februari 1920, Dewan Nasional Karabakh pertama didirikan yang menyetujui Karabakh berada di bawah yurisdiksi Azerbaijan, namun di sisi lain orang-orang Armenia tetap melanjutkan pertempuran gerilya. Perjanjian tersebut akhirnya

segera dibatalkan melalui Dewan Sembilan Karabakh yang kemudian medeklarasikan persatuannya dengan Armenia pada bulan April.

Pasukan Azerbaijan yang terkunci dalam Nagorno-Karabakh akhirnya harus melawan pasukan orang Armenia yang terus berjuang bersatu dengan Armenia. April 1920 Bolshevik mengambil alih Azerbaijan dikarenakan pasukan Azerbaijan terkunci di Karabakh. 10 Agustus 1920, Armenia menandatangani perjanjian awal dengan Bolsheviks, yang berisikan persetujuan Armenia untuk pendudukan sementara Bolshevik sampai ada penyelesaian akhir tercapai. Pada tahun 1921, Armenia dan Georgia juga kemudian diambil alih oleh Bolshevik. Untuk mengambil hati publik, Bolshevik menjanjikan Karabakh akan berada di bawah kekuasaan Armenia termasuk Nakchivan dan Zangezur.

Masalahnya, Uni Soviet lebih jauh memikirkan rencana jangka panjang dengan Turki, dalam rangka pengharapan suatu saat nanti Turki dapat sedikit membantu. Kebutuhan untuk berteman dengan Turki, Uni Soviet kemudian menyetujui untuk membagi penguasaan Zangezur, Nakchivan dan Karabakh. Zangezur jatuh berada di kekuasaan Armenia, dan Nagorno-Karabakh dan Nakchivan jatuh ke penguasaan Azerbaijan. Kalau bukan karena memikirkan isu Turki, Stalin akan memberikan Karabakh ke tangan Armenia. Hasilnya, Kantong Daerah Otonom Nagorno-Karabakh berdiri di dalam penguasaan Republik Sosialis Azerbaijan pada 7 Juli 1923.

Azerbaijan justru menunjukan bukti perjanjian-perjanjian Tsar Rusia dan Persia seperti Turkmanchay, Gullistan, dan Kurakchay (1805). Perjanjian-perjanjian tersebut menunjukan kepemilikan Transkaukasus kepada Tsar Rusia dari Persia. Sehingga, secara De Jure Transkaukasus memang milik kekuasaan Rusia yang bebas dipakai untuk perundingan apapun. Begitu pula pasca kemerdekaan yang

diperjuangkan oleh negara-negara Armenia, Azerbaijan, dan Georgia tahun 1917. Penguasaan kembali Bolshevik pada tahun 1920 setelah revolusi Rusia membuka kembali penguasaan Rusia terhadap ketiga negara ini yang dulu disebut negara-negara Transkaukasus. Sehingga, secara *De Jure* tersebut maka Azerbaijan 79 berhak sebagai penguasa Nagorno-Karabakh, dikarenakan semua sesuai dengan perjanjian-perjanjian Rusia dan Persia abad ke-19, Rusia dan Turki pada tahun 1923.

Pada tahun 1924, Nakhjivan menerima status Republik Otonomi di dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, walaupun faktanya wilayah tersebut tidak terhubung dengan Azerbaijan melainkan terpisah oleh wilayah Armenia. Keputusan bahwa Nakhjivan merupakan bagian dari wilayah Azerbaijan ditentukan pada saat yang bersamaan ketika mereka menentukan Nagorno Karabakh. Sebelumnya Nakhjivan sendiri sempat menjadi perebutan antara Soviet, Rusia dan Turki, tanpa mengikutsertakan Armenia sama sekali pada perjanjian Moskow pada Maret 1921. Pada perjanjian ini ditetapkan bahwa Nakhjivan tetap menjadi wilayah otonomi Azerbaijan, dan keputusan itu tidak bisa dirubah tanpa persetujuan Turki. (Idham Badruzaman, 2010, pp. 41-42)

4.1.1 Profil Geografi Nagorno – Karabakh

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan merupakan salah satu konflik perang menahun yang berakar sejak akhir abad ke-19 ketika kedua negara tersebut masih berada di bawah kekaisaran Rusia. Kedua negara ini mengokupasi daerah geografis yang disebut sebagai Transkaukasus—daerah yang terletak di Tanah Genting selatan dari Pegunungan Kaukasus dan di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Daerah Transkaukasus ini merupakan daerah yang dianggap penting dan strategis karena terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia, sehingga daerah ini sering

menjadi daerah pergerakan manusia seperti perdagangan, perpindahan, hingga perang dari abad ke abad. Akibat adanya mobilisasi inilah, orang-orang Romawi, Arab, dan Turki, menanamkan pengaruhnya di daerah ini.

Kristenisasi dari Romawi kemudian mengakar di Georgia dan Armenia, sedangkan pengaruh Islam mengakar di Azerbaijan dan daerah-daerah Kaukasus Utara yang lain, mengikuti invasi Arab ke daerah tersebut pada tahun 640 M. (Repository Univ Sebelas Maret, 2022, p. 2)

Nagorno – Karabakh adalah sebuah wilayah yang terkurung daratan membentang dari pegunungan rendah hingga ke selatan pegunungan kaukasus selatan. Secara umum wilayah ini adalah pegunungan dan tertutup oleh hutan yang lebat dan memiliki luas 4,400 kilometer bujur sangkar. Secara administratif, wilayah ini di bawah Pemerintahan Republik Nagorno-Karabakh, sebuah Republik merdeka secara *de facto*, namun Negara yang berdiri didalam wilayah Azerbaijan ini tidak diakui secara internasional.

Secara *De Jure*, Nagorno-Karabakh merupakan milik Azerbaijan berdasarkan kedaulatannya terhadap Nagorno-Karabakh pada perjanjian-perjanjian Tsar Rusia dan Persia seperti Kurkachay, Gullistan, dan Turkmanchay. Perjanjian Kurkachay Ibrahim Khan yaitu penguasa Nagorno-Karabakh telah memberikan kekuasaan penuh kepada kekuasaan Tsar Rusia setelah kekalahannya.

Nagorno Karabakh berasal dari dua kata dari dua bahasa berbeda. Kata Nagorno diambil dari kata sifat Rusia, berasal dari kata sifat *nagorny* (нагорный) yang berarti “dataran tinggi”. Nama Azerbaijan untuk wilayah ini sama dengan kata sifat *dağlıq* (pegunungan) atau *yuxarı* (dataran tinggi). Nama nama tersebut tidak ada dalam bahasa Armenia, tapi ada dalam nama resmi wilayah tersebut dalam periode era Uni Soviet sebagai sebuah kantong daerah otonom Bahasa lain yang dapat

diaplikasikan untuk menyebut pegunungan, dataran tinggi, atau daratan tinggi.
(Office of The Nagorno - Karabakh Republic)

Kata Karabakh secara umum dikaitkan dengan asal bahasa Turki dan Persia yang secara literatur bahasa berarti "Kebun Hitam". Nama yang pertama kali muncul dalam bahasa Georgia dalam sebuah sumber berbahasa Persia pada abad ke- 13 sampai abad ke-14. Karabagh adalah alternatif yang paling dapat dipakai dalam menyebut Karabakh, dan juga secara paten dipakai dalam wilayah tersebut.

Gambar 4.1 Geografi Nagorno Karabakh



Sumber: (Office of The Nagorno - Karabakh Republic)

Pemerintahan Nagorno-Karabakh di dirikan pada 7 Juli 1923 dengan Ibu Kota Stepanakert, Sistem Pemerintahan serupa Otonomi Khusus, berada di teritori Azerbaijan namun secara populasi 90% di dominasi oleh orang-orang Armenia, menjelang keruntuhan Uni Soviet, pada 26 November tahun 1991, Konflik militer pecah antara Armenia dan Republik Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan untuk memperebutkan Nagorno-Karabakh.

4.2 Eskalasi Konflik Nagorno – Karabakh

Sampai pada tahun 1980an situasi berubah di Uni Soviet. Keterbukaan atmosphere semakin nyata pada masa itu sehingga banyak aksi sporadis bermunculan sangat cepat pada tahun 1987, surat permohonan penyatuan mulai berdatangan di kantor pemerintah Moskow, petisi yang dipersiapkan oleh Akademi Keilmuan Armenia dengan ratusan ribu tanda tangan meminta pemindahan kekuasaan Nagorno Karabakh dan Nakhjivan ke Armenia,

Pada bulan Oktober, Armenia menolak menerima nominasi seorang direktur dari suku Azeri, Sovkhoz di daerah dominan Armenia bagian barat laut Azerbaijan. Hal ini memicu kerusuhan oleh kelompok lokal terhadap warga setempat. Menurut sumber dari Armenia, tujuan kelompok lokal tersebut semata-mata untuk mengusir warga populasi Armenia disana. Trend yang terjadi pada periode *Glasnost* adalah demonstrasi ekologi secara cepat kedalam politik, demonstrasi nasionalis meminta dikembalikannya Nagorno Karabakh dan Nakhjivan ke Armenia. Kali ini polisi lokal ikut campur dalam membubarkan demonstrasi. Sejalan dengan Moskow menahan diri dari berbuat sesuatu, spekulasi berkembang bahwa Moskow akan mengabaikan permintaan tersebut, khususnya karena Gorbachev mempunyai banyak penasehat dari suku Armenia (Idham Badruzaman, 2010, p. 42)

Pecahnya Uni Soviet membuat Armenia dan Azerbaijan berubah menjadi negara merdeka dan memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan keputusan. Jika sebelumnya keputusan mereka terkait Nagorno-Karabakh banyak terganjal oleh halangan dari Uni Soviet, kali ini keduanya pun bebas untuk saling memperebutkan Nagorno-Karabakh.

Konflik tersebut semakin berlarut-larut karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Azerbaijan secara matematis seharusnya dapat memenangi pertempuran itu dengan mudah karena selama menjadi bagian dari Uni Soviet, Azerbaijan sering menjadi tempat pangkalan militer. Jumlah militer dan persenjataan yang dimiliki oleh Azerbaijan pun lebih banyak jika dibandingkan dengan Armenia.

Namun fakta di lapangan, ditemukan kejanggalan karena pasukan Armenia dan Nagorno-Karabakh begitu tangguh menghadapi serangan dari Azerbaijan. Para analis mengatakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Armenia tidak terlepas dari peran Rusia yang secara rutin membantu pasukan militer ke Armenia, banyak

persenjataan yang dijual ke Armenia selama perang (Miftachun Niam & Amelia Zailani, 2011, pp. 27-28).

Analisa ini semakin dikuatkan oleh ucapan seorang pejabat militer dari Rusia, Jenderal Lev Rokhlin yang mengatakan bahwa Rusia melakukan penjualan amunisi secara ilegal dengan Armenia yang total nilai penjualannya mencapai satu miliar dollar AS. Senjata ilegal tersebut dipasok dari tahun 1992 hingga 1996. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Armenia dan mengatakan bahwa Rokhlin justru lebih sering memasok senjata ke Azerbaijan secara ilegal (Miftachun Niam & Amelia Zailani, 2011, p. 28).

Para analis barat mengatakan bahwa perang antara Armenia dan Azerbaijan telah banyak dimanfaatkan oleh Rusia sebagai ladang bisnis senjata militernya, Rusia selalu memberikan dukungan kepada Armenia, namun disisi lain juga memberikan dukungan kepada Azerbaijan.

Fakta lain terkait perang Nagorno – Karabakh tahun 1991 ini adalah kedua belah pihak, baik Armenia maupun Azerbaijan menggunakan tentara bayaran. Armenia banyak menggunakan tentara bayaran yang berasal dari Rusia dan berbagai negara persemakmuran lainnya. Beberapa diantaranya sempat tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Azerbaijan (UNHCR, 2011).

Demikian pula dengan Azerbaijan, mereka banyak menggunakan tentara bayaran yang berasal dari Afghanistan, Iran dan berbagai negara timur tengah lainnya. Bahkan, *The Wall Street Journal* menganalisa adanya keterlibatan Turki dalam pengaturan strategi pasukan Azerbaijan. Mereka direkrut langsung oleh Presiden Azerbaijan, Heydar Aliyev.

The Washington Post juga menemukan fakta bahwa Azerbaijan melakukan kerjasama dengan Perdana Menteri Afghanistan, Gulbuddin Hekmatyar dalam

pengadaan lebih dari 1.000 tentara bayaran. Sementara pasukan lainnya direkrut dari Turki dan Iran yang berfungsi sebagai pengatur strategi dalam pertempuran. Azerbaijan juga merekrut 200 tentara dari Rusia yang bertugas untuk memberi taktik dasar pada prajurit Azerbaijan yang berada di kota Bardam bagian barat laut Azerbaijan.

Konflik masih berada pada puncaknya hingga tahun 1994, Rusia menengahi gencatan senjata yang tetap di tempatnya sejak itu, upaya gencatan senjata oleh Rusia merupakan sebuah Terminasi yaitu untuk penyelesaian konflik. Sekitar 700.000 etnis Azeri (Azerbaijan) dipaksa keluar dari Nagorno Karabakh dan sekitarnya, dimana pemerintah separatis menyatakan kemerdekaan de facto, meskipun wilayah ini masih dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan oleh komunitas internasional meskipun wilayah ini masih dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan oleh komunitas internasional. Status sebagian besar pengungsi ini masih belum terpecahkan, lebih dari dua dekade kemudian. 44 Konflik juga mengakibatkan 235.000 pengungsi Armenia melarikan diri dari Azerbaijan. (Nur Indah Khairun Nisa, 2019).

Azerbaijan menganggap Nagorno-Karabakh sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal, mencatat bahwa pemerintahannya yang dideklarasikan sendiri tidak memiliki pengakuan internasional. Armenia, sementara itu, meyakini bahwa Nagorno-Karabakh tidak memiliki masa depan sebagai bagian dari Azerbaijan dan percaya bahwa konflik harus diselesaikan dengan pengakuan hak rakyat Nagorno-Karabakh untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengakuan itu kemungkinan akan mengarah pada kemerdekaan atau reunifikasi dengan Armenia, karena dari sekitar 145.000 populasi penduduknya, sekitar 90 persen adalah etnis Armenia. (Carl Schreck, 2014).

Menurut *Human Rights Watch*, sejak pertama kali bertempur melawan Azerbaijan di Nagorno Karabakh, Armenia sudah mendapatkan begitu banyak dukungan dari Rusia. Bantuan tersebut mulai dari persenjataan hingga relawan, bantuan dari Rusia mengalami puncaknya ketika Azerbaijan melaukukan serangan ke Armenia pada bulan Desember 1993.

Sedangkan untuk persediaan pasukan dari dalam negeri, Armenia melakukan segala cara mulai dari melakukan perekrutan pasukan militer secara besar-besaran hingga mengirimkan pasukan wajib militer ke Nagorno Karabakh. Pemerintah Armenia juga mengeluarkan Surat Keputusan No.129 tentang mekanisme perekrutan pasukan wajib militer (Human Rights Watch , 1993).

Pada awal tahun 1994, pasukan Azerbaijan sempat menunjukkan tanda tanda kemenangan. Presiden Aliyev juga berjanji akan merebut dengan segera wilayah yang telah direbut oleh Armenia dan membawa pulang warga Azerbaijan yang tinggal di pengungsian. Sayangnya, tidak berlangsung lama, kekuatan Armenia justru semakin aktif dan mengalahkan kembali pasukan Azerbaijan.

Satu per satu kawasan Nagorno Karabakh mulai berhasil direbut oleh Armenia dan Republik Artsakh. Pada bulan Mei 1994, pasukan Armenia semakin banyak memperoleh kemenangan dan berhasil menguasai 20 % wilayah Nagorno Karabakh yang tadinya dikuasai oleh Azerbaijan.

Pada tanggal 12 Mei 1994, diperoleh kesepakatan bahwa Azerbaijan harus meninggalkan kawasan Nagorno Karabakh. Sebagai akibat dari perjanjian ini, warga Azerbaijan dan pasukan Azerbaijan yang masih tertinggal di Nagorno Karabakh di usir. Pasukan Rusia juga turut membantu Armenia dengan mengusir warga Azerbaijan yang tinggal di kawasan Shahumyan.

Wilayah Shaumyan ini dijadikan sebagai jalur penghubung antara Nagorno Karabakh dan Armenia, melintang ditengah kawasan Azerbaijan. Kawasan tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai jalur lintas antara Nagorno Karabakh dan Armenia, dan diberi nama Koridor Lachin. Namun status kepemilikannya tetap menjadi milik Azerbaijan. Konflik antara keduanya pun akhirnya mereda untuk sementara dengan mediasi oleh Rusia (Miftachun Niam & Amelia Zailani, 2011, p. 31).

Eskalasi atau kenaikan konflik terjadi pada Pertarungan Mardakert 2008 dimulai pada 4 Maret setelah protes pemilihan Armenia 2008. Ini merupakan pertempuran terberat antara etnik Armenia dan pasukan Azerbaijan atas wilayah yang disengketakan di Nagorno Karabakh sejak gencatan senjata tahun 1994 setelah Perang Nagorno-Karabakh. Sumber-sumber Armenia menuduh Azerbaijan mencoba mengambil keuntungan dari kerusuhan yang sedang berlangsung di Armenia. Sumber sumber Azerbaijan menyalahkan Armenia, mengklaim bahwa pemerintah Armenia berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan internal di Armenia. (Omics International, 2014)

Pada tahun 2009-2010, konflik mengalami deskalasi atau penurunan konflik. Meskipun menurun, ketegangan masih terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah pada tahun 2014, dimana 27 tentara Armenia tewas dan 34 korban jiwa di pihak Azerbaijan. Pada tanggal 12 November 2014, angkatan bersenjata Azerbaijan menembak jatuh sebuah helikopter Mil-24 Mi-24 Angkatan Darat Nagorno Karabakh atas distrik Agdam Karabakh. Tiga prajurit tewas dalam insiden itu. Kementerian Pertahanan Armenia menyatakan bahwa pesawat itu tidak bersenjata dan menganggapnya sebagai provokasi. Pada 2015, 42 tentara Armenia dan 5 warga sipil tewas ketika bentrokan perbatasan berlanjut. Setidaknya

64 tentara Azerbaijan tewas pada pertempuran sporadis yang terjadi pada bulan Januari, Juni, Agustus, September, November dan sepanjang Desember. (Armeniagogo, 2018)

Salah satu peristiwa kelam dalam konflik Nagorno Karabakh adalah "Perang Empat Hari" pada tahun 2016. Konflik ini juga disebut "Perang April" ketika di pagi hari tanggal 2 April 2016, Angkatan Bersenjata Azerbaijan melancarkan serangan militer besar-besaran di sepanjang 170 kilometer Garis Kontak Karabakh-Azerbaijan dan setidaknya 200 orang tewas dalam perang tersebut (Armeniagogo, 2018) Hal tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2014-2016 konflik Nagorno-Karabakh berada pada puncak konflik.

Pada tahun 2017, konflik juga masih terjadi tetapi tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Konflik terjadi pada pertengahan tahun 2017 dimana pasukan Armenia menyerang desa Alkhanli di Azerbaijan dengan menggunakan mortir dan granat pada 4 Juli 2017. Pada penyerangan tersebut 2 warga Azerbaijan terluka, dimana satu korban merupakan balita berusia 2 tahun dan korban lain adalah nenek balita tersebut. (Anjaih, 2020)

Konflik Nagorno-Karabakh kemudian terjadi lagi pada tahun 2020. Konflik ini merupakan konflik bersenjata antara Azerbaijan yang didukung oleh Turki, dan Armenia memproklamirkan diri Bersama Republik Artsakh. Bentrokan dimulai pada tanggal 27 September 2020 di sepanjang Garis Kontak Nagorno-Karabakh, yang didirikan setelah perang pertama tahun 1988-1994. Menanggapi hal tersebut, Armenia dan Artsakh memberlakukan darurat militer dan mobilisasi total, sementara Azerbaijan memberlakukan darurat militer, jam malam, dan mobilisasi parsial. Banyak negara dari perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras pertempuran itu

dan meminta kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan negosiasi (IDN Times, 2020).

Setelah penangkapan di Shusha, pemukiman terbesar kedua di Nagorno-Karabakh, perjanjian gencatan senjata ditandatangani antara Presiden Azerbaijan, (Ilham Aliyev), Perdana Menteri Armenia (Nikol Pashinyan), dan Presiden Rusia (Vladimir Putin) yang mengakhiri perang ini. Presiden Artsakh, Arayik Harutunyan, juga setuju untuk mengakhiri permusuhan. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang bertikai akan tetap mengontrol wilayah yang mereka kuasai saat ini di Nagorno-Karabakh, sementara Armenia mengembalikan wilayah sekitarnya yang diduduki pada tahun 1994 ke Azerbaijan. Sekitar 2.000 tentara Rusia dikerahkan untuk menjaga perdamaian di sepanjang koridor Lachin antara Armenia dan Nagorno-Karabakh untuk mandat setidaknya lima tahun (The Moscow Time, 2020).

4.3 Kebijakan Resolusi Konflik Amerika Serikat Untuk Konflik Armenia dan Azerbaijan

A. Strategi Amerika Serikat Dalam Menengahi Konflik Armenia dan Azerbaijan

Strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menengahi konflik Armenia dan Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terkait konflik ini. Berdasarkan proses lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut, secara garis besar kebijakan Amerika Serikat ini dibagi dalam dua kategori, yakni kebijakan unilateral dan kebijakan multilateral.

1. Strategi Unilateral

Secara unilateral Amerika Serikat melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai presiden pada rentang waktu 1994-2001. Sesuai kebijakan luar negeri Amerika yang sifatnya unilateral, pendekatan Amerika oleh seorang ahli

dikatakan dibagi dalam dua bentuk pendekatan, yaitu : pendekatan *soft power* dan pendekatan *hard power*.

a. *Soft Power*

Pendekatan Soft Power oleh Amerika Serikat bagi kepentingannya di Kaukasus Selatan merupakan kebijakan yang berada pada masa pemerintahan era Bill Clinton. Pada tahun-tahun pertama pasca runtuhnya Uni Soviet, Amerika mulai menyediakan bantuan keuangan dan ekonomi pada negara-negara bekas Uni Soviet dalam mendukung perkembangan demokrasi dan pasar bebas. Walaupun, pada saat itu Amerika tidak terlalu membedakan antara negara Uni Soviet satu dengan lainnya, namun pada saat bersamaan Amerika sangat memusatkan perhatiannya pada Kaukasus Selatan yang dikarenakan sumber daya minyak yang ada di Azerbaijan, kedekatan Rusia dan Iran dengan regional itu, adanya kepentingan sebagian grup domestik seperti grup diaspora Armenia di Amerika dan grup pengusaha minyak yang banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika.

Kongres Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan *Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act*, yang mana dinyatakan oleh presiden Bush pertama sebagai berikut:

“authorized a range of programs to support free market and democratic reforms being undertaken in Russia, Ukraine, Armenia, and other states of the former Soviet Union”. (U.S. Department of State Archive Websites, 1993)

Kebijakan ini dilakukan dengan sebelumnya mengamandemen *Section 907* dari undang-undang Amerika bagi bantuan luar negeri mereka untuk negara-negara di bawah kekuasaan Uni Soviet. Terkait dengan konflik Armenia dan Azerbaijan pada saat itu, Azerbaijan menutup/memblokade pergerakan barang/bantuan luar negeri dari dan ke Armenia di perbatasan antara Azerbaijan dan Armenia, sehingga amandemen seksi 907 mengecualikan Azerbaijan di dalamnya untuk mendapatkan

bantuan luar negeri hingga dia mau membuka akses tersebut. Jadi, salah satu langkah bagi Amerika Serikat saat itu adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan akses bantuan luar negeri bagi negara-negara Kaukasus Selatan, sehingga kepentingan Amerika dapat diperoleh sekaligus menjadi strategi meredam konflik antara Armenia dan Azerbaijan mengenai Nagorno-Karabakh.

Azerbaijan, meskipun tidak menjadi sasaran bantuan luar negeri Amerika saat itu, namun tetap menjadi sasaran kepentingan Amerika di dalamnya. Kepentingan pengusaha minyak seperti Amoco yang merupakan perusahaan minyak terbesar di Amerika membuat Azerbaijan sebagai primadona bagi kepentingan ekonomi Amerika. Ini dikarenakan letak geografis Azerbaijan yang sangat strategis mampu menghubungkan Asia Tengah dengan Eropa sekaligus memiliki akses ke laut kaspia yang mengandung banyak sumber minyak sekitar 4 % dari persediaan minyak dunia. (Sutiono, 2014, p. 108)

b. *Hard Power*

Pendekatan-pendekatan *Hard Power* yang dilakukan Amerika Serikat dilakukan diantaranya pada masa George W. Bush yaitu pasca pemerintahan Bill Clinton. Ini dilakukan Amerika dikarenakan teror yang menghantam Amerika melalui tragedi 9 September 2001 di gedung World Trade Center Washington yang di hancurkan oleh sekelompok teroris yang menamakan kelompoknya dengan nama Al- Qaeda. Kebijakan-kebijakan yang banyak melibatkan militer itu yang menjadikan ini dikategorikan sebagai pendekatan *Hard Power*. Kebijakan Bush dalam menanggapi teror oleh Al-Qaeda dikenal dengan kebijakan "*War Against Terror*".

Pasca, terpilihnya Bush, kejadian 9 September 2001 dan hasil dari kebijakan *war against terror*, ada perubahan secara fundamental dalam kebijakan luar negeri

Amerika Serikat "*Peace Paradigm*" dan pendekatan-pendekatan *soft power* dalam pemerintahan Clinton telah diganti dengan "*war paradigm*" dan pendekatan-pendekatan *hard power* sebagai wujud nyatanya dalam mempromosikan kepentingan dan proyeksi global Amerika Serikat. Strategi global Amerika Serikat yang baru, berisikan usaha-usaha untuk membuat pangkalan militer di Kaukasus Selatan.

Mengingat pentingnya operasi militer di Afghanistan (sejak 2001) dan Irak (2003), maka Washington lebih banyak memberikan perhatiannya di Kaukasus Selatan secara keseluruhan dan Azerbaijan secara khusus. Untuk memudahkan ini banyak bantuan militer ke pada negara Kaukasus Selatan terutama Armenia yang sebagian wilayahnya sebagai pangkalan Udara Amerika Serikat, dan Azerbaijan sebagai pangkalan laut. Melalui bantuan militer kepada kedua negara ini diharapkan menjadi aliansi yang kuat bagi Amerika Serikat dalam mendukung kepentingan-kepentingan Amerika dan menjadi alat untuk menyeimbangkan kekuatan keduanya sehingga dapat terjadi perimbangan kekuatan yang berujung pada tidak terjadinya kontak senjata diantara keduanya. Sehingga, kepentingan Amerika dan keinginan meredam konflik Armenia dan Azerbaijan bisa berjalan beriringan.

2. Strategi Multilateral

Strategi multilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menengahi konflik Azerbaijan dan Armenia ini terwujud dalam usaha mereka mengawali sebuah proposal resolusi yang disebut dengan *Package Agreement* dan *Step By Step Plan*. Proposal ini diajukan oleh Amerika melalui organisasi internasional di bidang keamanan dan kerja sama negara-negara Eropa OSCE (*Organization on Security and Cooperation of European Countries*).

Lebih tepatnya sebagai salah satu anggota organisasi tersebut dan karena kepentingannya yang besar, keterlibatan Amerika akan penyelesaian konflik ini menjadi lebih dalam setelah Amerika menjadi salah satu pihak dalam ketua joint komite bersama Minsk Group untuk menyelesaikan konflik Nagorno Karabakh sebagai masalah utama konflik Azerbaijan dan Armenia. Dalam joint komite tersebut Amerika mengusulkan dua alternatif cara dalam penyelesaian konflik tersebut, yaitu *Package Agreement* dan *Step by Step plan*.

a. Package Agreement

Package Agreement adalah sebuah dokumen komprehensif yang dipresentasikan dalam proposal mediator Minsk Grup OSCE oleh Komite Bersama Amerika, Rusia, dan Prancis yang disponsori oleh Amerika yang mencoba membuat buah perjanjian menyeluruh untuk kerangka dasar sebuah rencana perdamaian. Hal-hal utama dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Penarikan pasukan bersenjata dari perbatasan Azerbaijan-Armenia sekaligus pasukan yang berada di dalam Nagorno-Karabakh yang ada sejak 1988;
- Membentuk sebuah “*buffer zone*” dalam wilayah-wilayah evakuasi dan penggunaan sebuah pasukan penjaga perdamaian OSCE;
- Mengembalikan para pengungsi ke wilayah yang bebas militer;
- Memberikan hak eksklusif bagi Nagorno-Karabakh untuk mengontrol koridor Latchin yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Armenia dan Azerbaijan dengan jaminan OSCE yang diperoleh dari izin Azerbaijan;
- Nagorno-Karabakh memiliki hak untuk langsung membuat hubungan luar negeri dengan negara-negara lain dan organisasi internasional lainnya dalam rangka ekonomi, sains, budaya, olahraga, dan hal-hal berupa sosial kemanusiaan lainnya;

- Nagorno-Karabakh memiliki perwakilan di dalam parlemen Azerbaijan;
- Nagorno-Karabakh berdasarkan perbatasan 1988 termasuk dalam wilayah Azerbaijan, namun dengan status otonomi tertinggi yang memiliki parlemen sendiri, konstitusi sendiri, bendera, dan simbol-simbol nasional. Konstitusi Azerbaijan harus di amendemen untuk menyesuaikan hak-hak Nagorno-Karabakh ini dan pengadilan dan hukum Azerbaijan akan berlaku di Nagorno-Karabakh jika hanya tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum Nagorno-Karabakh. (OSCE, 1992)

Perjanjian ini pada dasarnya sangat didukung oleh pihak Azerbaijan dan Armenia sebagai pihak-pihak yang bertikai. Namun, perjanjian ini ditolak oleh penduduk Armenia yang ada di Nagorno-Karabakh yang hanya memiliki dua pilihan yaitu merdeka atau bergabung kembali dengan Armenia. Sehingga, perjanjian ini pun batal dilakukan sebagai sebuah langkah untuk menyelesaikan masalah secara damai.

b. *Step By Step Plan*

Pasca kegagalan negosiasi musim panas (*Package Agreement on July 1997*) dan *autumn* pada tahun 1997 untuk membuat sebuah perjanjian komprehensif, maka mediator-mediator Minsk Group yang disponsori oleh Amerika mengusulkan sebuah rencana baru yang mana akan dijalankan dalam beberapa fase. Rencana baru ini dibuat dalam rangka mengganti proposal sebelumnya yang gagal. Secara garis besar inilah strategi dalam proposal baru ini :

- Penarikan secara menyeluruh pasukan bersenjata oleh kedua pihak di medan konflik secara bertahap dan dipastikan pelaksanaannya dengan memasukan pasukan perdamaian dalam rangka menjamin keamanan dalam rangka

mencegah serangan-serangan tak terduga dari pihak-pihak lain yang tak terduga pula.

- Koridor Latchin yang merupakan satu-satunya jalur masuk dari Azerbaijan yang menuju Armenia akan tetap dibawah kontrol pasukan bersenjata Nagorno-Karabakh.
- pembentukan komisi bersama antara Azerbaijan dan Armenia untuk menyelesaikan masalah status Nagorno-Karabakh dan beberapa isu- isu seperti status koridor Latchin, kota Shusha, dan kota Shahumian (OSCE, 1992)

Syarat-syarat dalam proposal ini kemudian diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, namun pemerintahan orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh tidak menerima perjanjian tersebut. Beberapa alasan yang menyebabkan penolakan akan proposal tersebut adalah tidak jelasnya status koridor Latchin dan juga status Nagorno-Karabakh. Namun, yang lebih penting adalah tidak termasuknya Nagorno-Karabakh sebagai pihak yang menentukan status akhir dari Nagorno-Karabakh sebagai resolusi dari konflik yang terjadi.

4.4 Kebijakan Resolusi Konflik Rusia Untuk Konflik Armenia dan Azerbaijan

Sejak keruntuhan Uni Soviet usai perang dingin, konflik militer di Kaukasus Selatan mengundang partisipasi aktif dan menentukan dari Rusia sebagai negara yang didominasi bidang keamanan dalam pilar utama kebijakan negara. Tidak bisa dipungkiri Rusia masih memiliki ambisi di regional Kaukasus dan kehadiran militernya adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Kaukasus. Rusia memiliki kompetensi dalam mempengaruhi kebijakan negara-negara Kaukasus yang berasal dari rute penting regional dengan

dunia sekitar yang didominasi oleh Rusia, baik dalam hal ekonomi dan energi. (Irena Sargsyan, 2003).

Rusia memandang negara-negara post-Soviet sebagai prioritas kebijakan luar negerinya. Tekanan-tekanan secara langsung tidak lagi digunakan. Rusia memanfaatkan peninggalan historis dan ikatan budaya untuk menjadi mediator alami sebagai orientasi kebijakan luar negeri. (Serena Giusti & Tomislava Penkova, 2008, p. 25)

Sejak disepakatinya rezim gencatan senjata tahun 1994, Rusia memainkan *leading role* dalam negosiasi berdasarkan kerangka kerja dari Minsk Group dalam konflik Nagorno-Karabakh yaitu antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh menarik dari sudut pandang hubungan internasional karena merupakan konflik yang berlarut-larut atau berkepanjangan. Meskipun telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, lebih dari dua puluh tahun belum ada penyelesaian yang dicapai sehingga berdampak negatif terhadap Kaukasus secara keseluruhan (Margarita Tadevosyan, 2010)

Saat ini, posisi Rusia sebagai pemain dalam dinamika konflik Nagorno-Karabakh dapat dilihat dari level geopolitik. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara geopolitik, Rusia dipandang mengambil keuntungan dalam *status quo* konflik ini. Melalui partisipasi Armenia dalam CSTO (Collective Security Treaty Organization), Rusia dapat meraih keuntungan melalui kerjasama yang terjadi, seperti penempatan pangkalan militernya yang terus diperpanjang hingga 2044 di Armenia. Rusia menjadikan Armenia sebagai alat untuk menjaga keseimbangan di wilayah Kaukasus Selatan karena melihat Azerbaijan semakin kuat secara ekonomi dan militer. (Ensi Adistya Kristiani, 2013, p. 5)

Senada dengan pendapat diatas, sebagian orang, termasuk pengamat, dari Yerevan hingga Baku dan Washington hingga Brussels berpendapat bahwa Moskow tidak tertarik dalam resolusi konflik Nagorno-Karabakh dan Rusia justru menghalangi upaya resolusi konflik. Rusia mendukung adanya status quo untuk menjaga regional Kaukasus Selatan di bawah pengaruhnya. Persepsi negatif terhadap peran Rusia tidak hanya didukung oleh alasan kepentingan geopolitik Rusia, tetapi juga terjadinya perang Rusia-Georgia tahun 2008. Namun, perang Rusia-Georgia memunculkan ekspektasi tersendiri bagi prospek peran Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh karena alasan memperbaiki citra Rusia yang turun di mata internasional setelah terlibat perang dengan Georgia. Ekspektasi peran Rusia didukung dengan bukti terciptanya Deklarasi Moskow 2008 yang penandatanganannya dilakukan di Moskow dalam pertemuan trilateral Presiden Armenia, Azerbaijan, dan Rusia (Anahit Shirinyan, 2013)

Ada ketertarikan untuk melihat dengan seksama keterlibatan Rusia dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh disebabkan adanya problematika yang ditunjukkan oleh posisi Rusia yang dilematis yaitu sebagai player (pemain) sekaligus mediator. Keterlibatan Rusia sebagai pihak ketiga sudah ada sejak dimulainya konflik. Rusia merupakan negara pertama dan negara kunci dimulainya proses negosiasi. Kala itu terjadi konflik terbuka antara Armenia dan Azerbaijan pada tahun 1991 hingga 1994 yang diawali oleh aksi militer Azerbaijan sebagai reaksi penolakan pernyataan Parlemen Eropa yang berniat mengakui kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Konflik terbuka diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata melalui penandatanganan *Bishkek Document* pada bulan Mei 1994 di Bishkek. Rusia merupakan negara yang membawa Armenia dan Azerbaijan masuk ke dalam kesepakatan ini. (Ensi Adistya Kristiani, 2013, p. 4)

Rusia juga berupaya mengantisipasi masalah untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif dengan menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menimbulkan polemik internasional dan politisasi isu yang dapat menyebabkan konfrontasi sehingga menghambat proses penyelesaian konflik. Lavrov melakukan konferensi pers pada tanggal 13 Januari 2011 yang meminta kepada semua pihak untuk tidak menimbulkan polemik agar mendukung proses penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. (Victoria Dementyeva, 2011)

Tahun 2012 diwarnai dengan satu isu sensitif yang bergulir adalah pemilihan umum yang digelar di Nagorno-Karabakh pada tanggal 19 Juli 2012. Rusia menanggapi dengan menyatakan bahwa pemilihan di Nagorno-Karabakh tidak akan mempengaruhi negosiasi penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Selain itu, Rusia memberikan tanggapan yang diwakili oleh Duta Besar Rusia untuk Azerbaijan Vladimir Dorokhin mengenai pembangunan bandara udara di ibu kota Stepanakert bahwa rencana tersebut akan mengganggu terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan kembali kepercayaan antara Armenia dan Azerbaijan serta menjadi kontra produktif dari sudut pandang proses penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh secara damai. Dorokhin menambahkan bahwa sebaiknya pihak Armenia maupun Azerbaijan menghindari mempolitisasi isu baru, termasuk rencana pembangunan bandara udara Nagorno-Karabakh. (RBTH, 2012)

Sepak terjang Rusia dalam memfasilitasi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan tidak dapat diragukan lagi. Rusia adalah mediator yang paling aktif selama tahun 2010 dan 2011.¹⁰¹ Dari sepuluh konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh Co-chairman OSCE Minsk Group, Rusia menjadi fasilitator delapan pertemuan yaitu pada tanggal 2 November di Moskow, 4 Juni 2009 di St. Petersburg, 18 Juli 2009 di Moskow, 25 Januari 2010 di Sochi, 17 Juni 2010 di St.

Petersburgh, 27 Oktober 2010 di Astrakhan, 5 Maret 2011 di Sochi, 24 Juni 2011 di Kazan, dan 23 Januari 2012 di Sochi.

4.5 OSCE Minsk Group Sebagai Media AS dan Rusia Untuk Terlibat Menengahi Konflik Nagorno-Karabakh

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) atau organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa merupakan sebuah organisasi yang pada awalnya terbentuk sebagai forum multilateral untuk berdialog dan bernegosiasi antara negara-negara barat dan timur. Lahirnya organisasi ini dimulai dengan ditandatanganinya Helsinki final act pada tanggal 1 Agustus 1975. (Helsinki Final Act, 1992)

Kekerasan terus terjadi antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh. Meningkatkan kekerasan membuat CSCE mengadakan *Review Conference* pada Maret 1992 sebelum melakukan KTT pada bulan Juni di Helsinki. Mengingat Armenia dan Azerbaijan telah diakui sebagai anggota CSCE dua bulan sebelumnya, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa tindakan sebagai upaya mengurangi konflik dua anggota baru mereka. (OSCE, 1992)

Pada tahun 1992, OSCE membentuk sebuah institusi yang diharapkan mampu untuk menciptakan perdamaian dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Institusi dibawah naungan organisasi OSCE tersebut dikenal dengan nama OSCE Minsk Group.

Perubahan signifikan terjadi dalam kerangka Minsk Group saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Budapest. Perubahan tersebut terlihat dari berubahnya nama *Commission on Security and Co-operation in Europe* (CSCE) menjadi *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Selain itu, model konsorsium untuk

OSCE Minsk Group juga digantikan dengan struktur equal co-chair. Struktur tersebut diubah untuk mengurangi kemungkinan potensi gesekan antara struktur mediasi. Pada konferensi itu juga, Rusia dan Swedia kemudian dipilih sebagai co-chairs Minsk Group

OSCE Minsk Group saat ini terdiri dari 3 co-chairs dan 8 anggota tetap, termasuk Armenia dan Azerbaijan. Sejak awal, Rusia telah bertahan menjadi co-chair dan menjadi partisipan paling aktif dalam proses negosiasi. Namun, Azerbaijan meminta AS untuk menjadi bagian dari ketua umum karena menurut Azerbaijan, Rusia tidak netral dalam proses mediasi karena kedekatannya dengan Armenia. Kemudian pada tahun 1997, Amerika Serikat bergabung sebagai co-chair untuk melengkapi trio co-chairs OSCE Minsk Group. Anggota OSCE Minsk Group lainnya, seperti Belarus, Jerman, Itali, Swedia, Finlandia dan Turki tidak berpartisipasi dalam melakukan mediasi konflik di wilayah Nagorno- Karabakh. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2017)

a. Tugas Minsk Group

Tugas *Minsk Group* meliputi:

- Menyediakan dan mendukung kerangka yang cocok untuk resolusi konflik dengan terus meyakinkan proses negosiasi.
- Mendapatkan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih guna diambil jalan tengah antara keduanya, dan memberi jalan kepada pasukan perdamaian untuk bisa melakukan tugasnya disana di bawah payung OSCE.

b. Mekanisme

Pemimpin Minsk Group akan datang ke kedua daerah yang berselisih dan melakukan perundingan untuk mendapatkan maksud dan keinginan masing-masing pihak. Selain itu juga mereka bisa melakukan pertemuan antara ketua

dan anggota Minsk Group untuk briefing pada proses yang akan dijalankan. Seperti konflik Nagorno-Karabakh, Presiden negara masing-masing ketua Minsk Group Rusia, Amerika dan Perancis rutin menggelar pertemuan dengan pemimpin dua negara yang berkonflik Armenia dan Azerbaijan.

4.5.1 Kebijakan AS dan Rusia Melalui OSCE Minsk Group untuk Konflik Armenia dan Azerbaijan

Semenjak dibentuknya OSCE Minsk Group, setidaknya sudah terdapat empat proposal solusi untuk konflik Nagorno-Karabakh. Di antaranya; *package plan*, *step-by-step plan*, *common state plan*, *prague process* dan terakhir rencana pertukaran teritori. Dimulai dari tahun 1994 hingga 2002 sudah terdapat beberapa upaya mediasi konflik Nagorno-Karabakh, oleh 3 Ketua Umum Minsk Group.

1. Di bulan Juni 1997, proposal mengenai solusi konflik yang dikenal dengan nama '*package solution*' diajukan oleh co-chair Minsk Group disaat kunjungan ke kawasan Nagorno-Karabakh. Proposal itu mengusulkan penarikan pasukan bersenjata Armenia dan penghentian permusuhan serta persetujuan mengenai status final Nagorno-Karabakh dalam satu tahap. Selain itu, poin yang diajukan dalam proposal tersebut antara lain; otonomi penuh Nagorno-Karabakh dalam teritori Azerbaijan, pengembalian pengungsi dan tunawisma ke rumahnya masing-masing, penerjunan pasukan penjaga perdamaian OSCE, serta pencabutan blokade ekonomi

2. Pada November 1998, co-chair Minsk Group kembali mengajukan proposal berdasarkan konsep "*common state*". Berdasarkan konsep ini, Nagorno-Karabakh memiliki status sebagai negara dan unit teritorial dalam bentuk republik, yang dimana bersama dengan Azerbaijan membentuk sebuah common state dalam batas teritori Azerbaijan yang diakui secara

internasional. Namun, Azerbaijan menolak proposal ini dikarenakan hal ini sangat melanggar kedaulatan Azerbaijan dan berlawanan dengan prinsip mendasar yang telah ditetapkan di Lisbon (A Garibov, 2015)

3. Pada tahun 1999, atas inisiatif sendiri baik Presiden Azerbaijan maupun Presiden Armenia memiliki rencana penyelesaian konflik tersendiri setelah berkali-kali melakukan pertemuan. Rencana tersebut dinamakan "*Goble Plan*", yang mengusulkan pertukaran teritori antara kedua negara; sebagai ganti kontrol Armenia terhadap Nagorno-Karabakh dan koridor Lachin, maka Azerbaijan akan mendapatkan ganti lahan berupa koridor di selatan Armenia yang menghubungkan antara wilayah utama Azerbaijan dengan enklave Nakhichevan, dan juga nantinya akan terhubung langsung dengan teritori Turki. Namun, proposal ini tetap menimbulkan pertentangan sengit di dalam negeri. Di Azerbaijan sendiri, proposal ini dianggap sebagai bentuk "penyerahan diri" atas klaim terhadap Karabakh, dan tiga penasihat utama Presiden Azerbaijan Heydar Aliyev mengundurkan diri karena adanya proposal tersebut. Sementara proposal tersebut juga dinilai kontroversial bagi Armenia karena harus menyerahkan wilayah Meghri kepada Azerbaijan, yang artinya Armenia akan kehilangan wilayah perbatasannya dengan Iran. (N Caspersen, 2017)

4. Setelah tahun 2001, format pembicaraan berubah karena baik presiden Armenia maupun Azerbaijan menolak untuk melakukan tatap muka secara langsung. Pada tahun 2002, diadakan kembali pertemuan antara perwakilan khusus dari Presiden Armenia dan Presiden Azerbaijan yang dilakukan di Praha, Ceko. Pembicaraan langsung antara menteri luar negeri Armenia dengan Azerbaijan kemudian dikenal dengan istilah "*Prague Process*" sejak tahun 2004. Meski demikian, pertemuan antar menteri luar negeri tersebut tidak membawa hasil yang berarti. Proses mediasi antar kedua negara masih terus berlanjut dan belum

membuahkan hasil signifikan hingga saat ini Azerbaijan. (A Garibov, 2015, pp. 83-84)

5.1 Geopolitik Kawasan Kaukasus Selatan

Kaukasus Selatan merupakan kawasan vital karena posisi geopolitiknya, terutama sebagai titik persilangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Kekuatan hegemonik telah menggunakan wilayah ini sebagai basis dari mana mereka dapat mempengaruhi wilayah tetangga. Di masa lalu geo-strategi seperti itu telah dilakukan oleh kerajaan Ottoman dan Persia. Di era kontemporer, Rusia dan AS terlibat dalam melakukan strategi semacam itu. Rusia menganggap Kaukasus Selatan sebagai halaman belakang pengaruh tradisionalnya dan melawan meningkatnya keterlibatan Barat di wilayah ini. Untuk AS – dengan keterlibatan militernya yang besar di Irak dan Afghanistan, khususnya dengan mundurnya Uzbekistan ke kubu Rusia dan SCO (Shanghai Cooperation Organization) yang mengadopsi sikap anti-Barat (Andrej Tibol & Vincent Cillesen, 2006, p. 11)

Pentingnya geopolitik wilayah Kaukasus Selatan juga didasarkan pada keberadaan sumber daya energi yang berharga, terutama di Azerbaijan, Laut Kaspia dan negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Turkmenistan. Sumber daya ini menjadi lebih signifikan sebagai tujuan geo-strategis pada saat permintaan meningkat. Pentingnya kawasan Kaukasus Selatan juga telah berkembang sebagai akibat dari kebijakan energi oleh negara-negara konsumen di Barat yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya dari Rusia dan Timur Tengah.

Ketegangan dan konflik antara kekuatan lokal, regional dan global, kepemimpinan wilayah separatis, dan kejahatan terorganisir adalah penyebab berlanjutnya ketidakstabilan di Kaukasus Selatan dan sebagai akibatnya mempengaruhi status geopolitik lokal (Armenia, Azerbaijan, Georgia) dan aktor

regional (Turkey dan Iran). Konflik Nagorno Karabakh adalah salah satu penyebab dan kepentingan yang saling terkait dari berbagai pihak membuat ketidakstabilan di kawasan Kaukasus Selatan berkembang dalam skala yang lebih besar.

Hal ini akan mempengaruhi situasi politik dan keamanan energi para aktor yang terlibat. Selain itu, negara-negara lain yang tidak terlibat langsung, mungkin juga terpengaruh olehnya. Stabilitas di Kaukasus merupakan persyaratan vital untuk transportasi minyak dan gas Kaspia yang tidak terputus. Wilayah Laut Kaspia (Kaukasus Selatan dan Asia Tengah) mengandung sekitar 3-4 persen cadangan minyak dunia (Timur Tengah: 65 persen) dan 4-6 persen cadangan gas dunia (Timur Tengah: 34 persen). Dengan demikian, inilah yang menjadi perhatian khusus Amerika Serikat pada situasi keamanan dan energi di Kaukasus Selatan. Dengan sendirinya, bagian Kaukasus dari cadangan minyak dan gas global tidak cukup besar. Namun, mengingat ketidakpastian atas keandalan pasokan Teluk Persia, serta kemungkinan bahwa Rusia dapat menggunakan pengiriman energi sebagai alat listrik, transportasi Kaspia dan Asia Tengah (Kazakhstan dan Turkmenistan) pasokan energi ke Barat melalui Kaukasus menjadi sangat penting. Ini menjadikan Kaukasus Selatan sebagai area vital untuk geo-strategi dan keamanan energi. (Baran Z, 2002).

5.1.1 Geostrategis Kawasan Kaukasus Selatan

Kaukasus Selatan—terletak di persimpangan Asia Barat dan Eropa Timur—menjadikan kawasan ini titik pertemuan geostrategis yang berharga, terutama karena cadangan hidrokarbon yang kaya di Laut Kaspia.

Kesadaran geopolitik terhadap nilai strategis Kaukasus Selatan ini, khususnya dalam besarnya kekayaan sumberdaya alam di bidang minyak dan gas alam, baik di dalam bumi maupun di dasar laut Kaspia. Sehingga mendorong ide membangun jaringan pipa yang melintasi Kaukasus selatan untuk membawa sumber daya alam tersebut ke pasar Eropa.

Ada masa ketika Kaukasus merupakan titik persinggahan antara Eropa dan Asia; Jalur Sutra yang lama melalui kawasan tersebut. Tanah yang terbentang sepanjang 1.200 kilometer antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Terbangunnya jaringan rel kereta api pada 2012 yang terentang mulai dari Baku, ibukota Azerbaijan, lalu ke Tbilisi di Georgia, kemudian terus ke Kars, kota pusat perdagangan Turki di ujung barat daya Kaukasus, nampaknya jadi pertarungan geopolitik yang cukup vital bukan saja bagi Azerbaijan, Georgia dan Armenia. Bahkan bagi Rusia dan Turki. (Hendrajit, 2021)

Halford J. Mackinder seorang ahli geografi dan ahli geopolitik Inggris, akan menggambarkan wilayah dunia ini sebagai daerah pedalaman dalam pidato tahun 1904 Poros Geografi Sejarah kepada *Royal Geographical Society*. Ide ini akan menjadi dasar kontribusinya pada geostrategi. Secara geografis, Pivot mencakup seluruh Asia Tengah, dengan tambahan sebagian besar Iran, dan Rusia juga.

Proyeksi Pivot ke Asia Tengah ditentukan di satu sisi oleh Laut Kaspia dan Kaukasus, dan di sisi lain oleh pegunungan yang membentang dari Pakistan timur laut hingga Mongolia dan Rusia selatan. Proyeksi segitiga selatan ke Asia Tengah ini adalah bagian dari wilayah yang tidak dapat diakses oleh kekuatan laut (terutama Inggris, AS, Jepang, dan Prancis). Dengan demikian, ini adalah wilayah yang secara strategis penting dari mana kekuatan darat dapat diproyeksikan ke seluruh daratan Eurasia, hampir tidak terhalang oleh kekuatan laut. (Wikipedia)

Ahli geostrategis dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Zbigniew Brzezinski menganalisis Asia Tengah dalam bukunya tahun 1997 *Papan Catur Agung*, menyebut wilayah pasca-Soviet "Lubang Hitam" dan Asia Tengah pasca-Soviet (Kaukasus, bekas SSR, dan Afghanistan) khususnya "Balkan Eurasia". Kawasan tersebut merupakan multi etnis, rawan ketidakstabilan dan konflik, tanpa rasa identitas nasional, melainkan kekacauan pengaruh budaya sejarah, loyalitas suku dan marga, dan semangat keagamaan. Negara-negara yang memproyeksikan pengaruh ke wilayah tersebut tidak lagi terbatas hanya pada Rusia, tetapi juga Turki, Iran, Cina, Pakistan, India dan Amerika Serikat.

5.2 Kepentingan Geopolitik Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki tiga kepentingan utama dalam bidang geopolitik di kaukasus selatan. Ketiganya adalah stabilitas dan keamanan, demokratisasi, dan akses ekonomi ke dua regional utama yaitu dari Asia Tengah ke Eropa Barat yang mana dimaksudkan untuk menghindari Iran dan Rusia (U.S. Department of State, 2021)

1. Politik

Sejak kemerdekaan negara-negara kaukasus selatan, Amerika telah memiliki kebijakan tersendiri bagi negara-negara bekas Uni Soviet tersebut. Secara politik kebijakan pertama yang dilakukan oleh Amerika adalah memberikan pengakuan resmi kepada negara-negara bekas Uni Soviet sebagaimana pernyataan presiden Bush. Kebijakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan ketergantungan negara-negara tersebut dari Rusia. Dengan kemandirian atau penentuan nasib sendiri, maka dengan sendirinya Amerika mampu melakukan langkah untuk menanamkan paham politiknya untuk mendemokratisasi negara-

negara tersebut sehingga mampu melakukan “pembendungan” terhadap *political influence* dari Rusia. Kebijakan Bush tersebut sebagai contohnya melalui *Freedom Support Act by Section 907* yang ditandatangani oleh Bush dengan persetujuan oleh parlemen Amerika. *Freedom Support Act* merupakan sebuah kebijakan mendukung negara- negara baru merdeka (pecahan Uni Soviet) untuk mengadopsi demokrasi dan membuka diri demi terbukanya negara-negara tersebut ke dalam dunia internasional dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Negara-negara pertama yang dengan senang hati menerima ini adalah Armenia (melalui diaspora Armenia di Amerika *Freedom Support Act* dapat diterima di parlemen), Georgia, dan negara-negara kaukasus utara. Pada mulanya Azerbaijan tidak menerima *FreedomSupport Act* ini, namun dengan adanya kepentingan minyak yang membutuhkan eksplorasi dengan teknologi dan modal besar, ditambah masuknya kepentingan Amoco (perusahaan minyak dari Amerika) untuk bekerjasama dengan perusahaan minyak nasional Azerbaijan SOCAR maka Azerbaijan menerima bantuan kenusiaan dan mau mengadopsi demokrasi serta membuka diri bagi pasar bebas (Inessa Baban & Zaur Shiriyev, 1992)

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan tersebut di atas semata-mata hanya untuk menghilangkan ketergantungan negara-negara tersebut secara ekonomi dan politik dari Rusia yang merupakan pembawa ideologi Uni Soviet yang telah runtuh. Ditambah lagi dengan Iran yang ingin menanamkan pengaruhnya terutama Azerbaijan yang merupakan sesama negara muslim. Sebagaimana diketahui Amerika dan Iran telah bersaing menanamkan pengaruh masing-masing di Timur Tengah dan Asia Tengah sejak perang teluk 1979. Kurang lebih kepentingan-kepentingan politik yang diinginkan oleh Amerika untuk kawasan kaukasus selatan adalah pembendungan pengaruh politik dari ideologi Sosialis Rusia, dan membatasi

pengaruh Iran yang secara ideologi adalah muslim. Yang mana dengan begitu demokratisasi negara-negara kaukasus selatan merupakan solusi dan strategi utama dalam menanamkan pengaruhnya di kaukasus selatan ditambah dengan pemberian bantuan demi memuluskan kepentingannya.

2. Ekonomi

Secara ekonomi apa yang menjadi pertarungan Amerika Serikat adalah sebuah pengaruh kebijakan yang didapatkan dari perusahaan minyak besar Amerika Amoco, yang bekerja sama dengan British Petroleum untuk mengelola sumber-sumber minyak yang dikelola oleh perusahaan minyak nasional Azerbaijan SOCAR. Kepentingan ini sangat penting dikarenakan secara geografis kedekatan kaukasus selatan dengan laut kaspia (Azerbaijan) yang juga merupakan pintu masuknya minyak-minyak dari negara-negara Asia tengah seperti Kazakhstan dan Turkmenistan yang memiliki kandungan minyak hingga 4% dari kandungan minyak dunia serta 6% kandungan gas dunia. Bukan hanya Azerbaijan yang merupakan bagian dari kepentingan ekonomi Amerika di kaukasus selatan, melainkan Armenia pun demikian. (Sutiono, 2014, pp. 99-100)

Armenia dan Georgia merupakan dua negara yang langsung berbatasan dengan Rusia. Dengan melakukan kerja sama ekonomi yang intens diharapkan dapat melepaskan ketergantungan keduanya dari Rusia, dan dapat mengurangi ketergantungan energi keduanya dari Rusia. Ditambah Armenia yang sangat strategis untuk dikuasai secara ekonomi oleh Amerika karena kedua negara Rusia dan Iran merupakan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Armenia di sebelah utara dan selatan. Kerapuhan ekonomi Armenia menjadi perlu dilakukan pemberian bantuan

agar ketergantungannya dengan negara Rusia dan Iran dapat direduksi. Kepentingan ekonomi yang diharapkan adalah membatasi Iran sesuai sanksi embargo yang diberikan kepada Iran tersebut.

Armenia tidak masuk dalam perencanaan tersebut dikarenakan konflik yang terjadi antara Armenia dengan negara tetangganya Azerbaijan. Sedangkan, Azerbaijan merupakan jalur utama sekaligus penghasil utama minyak laut kaspia. Keduanya terlibat konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh yang menyebabkan ketidak inginan Azerbaijan jika Armenia masuk dalam proyek tersebut.

Kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang ada merupakan produk dari letak geografi yang dimiliki oleh negara-negara kaukasus selatan tersebut yang merupakan persimpangan tiga benua besar yaitu Asia, Eropa dan Afrika. Azerbaijan merupakan negara yang langsung berbatasan dengan Timur Tengah melalui Iran Asia Tengah melalui laut Kaspia sekaligus Eropa melalui Turki. Begitu pula Georgia, yang menghubungkan Asia Tengah melalui Turkmenistan, dan Eropa melalui Ceyhan – Turki. Sedangkan Armenia menghubungkan Timur tengah melalui Iran, dan Eropa melalui Turki, namun hanya Iran yang menjalin hubungan bilateral dengannya dikarenakan hubungan dengan Turki dipengaruhi oleh konflik Nagorno-Karabakh yang mana Turki mendukung Azerbaijan dalam konflik tersebut. (Sutiono, 2014, p. 104)

5.3 Kepentingan Geopolitik Rusia

Rusia sebagai negara yang berdekatan secara geografis dan memiliki kedekatan historis dengan kawasan Asia Tengah, menganggap ketidakstabilan di kawasan tersebut dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Rusia ingin menanamkan dan meperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tengah dikarenakan

kepentingan yang ingin dicapai yaitu kepentingan sumber daya alam, politik, ekonomi dan keamanan. Hal ini menyebabkan Rusia berperan aktif di kawasan demi mencapai kepentingan-kepentingannya.

Pada masa Vladimir Putin menjabat sebagai presiden menggantikan Boris Yeltsin, Rusia mulai kembali meningkatkan peranan politik dan keamanan di kawasan Asia Tengah. Putin menjadikan kawasan Asia Tengah sebagai pembuktian bagi Rusia untuk dapat kembali menjadi negara *great power* dan penyeimbang kekuatan dunia. Hal ini terlihat dari upaya Rusia untuk tetap mempertahankan kebijakan *near abroad* demi mencapai kepentingan utamanya yaitu menjamin keamanan dan mempertahankan dominasi Rusia di kawasan tersebut.

5.3.1 Kebijakan *Near Abroad* Rusia

Kebijakan Rusia *near abroad* semakin terlihat sejak masa pemerintahan Vladimir Putin menjadikan eks-Soviet yang tergabung dalam CIS sebagai wilayah prioritas dalam kebijakan luar negeri. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin pemerintah Rusia berupaya memperbaiki dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara eks Soviet. Peningkatan hubungan dengan *near abroad* di Asia Tengah salah satunya diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi dan keamanan. Untuk kebijakan ekonomi dilakukan melalui kerjasama di sektor energi dan perdagangan, sementara itu untuk kebijakan keamanan melalui peran Rusia dalam kerjasama di sektor perbatasan, maupun melalui militer

Berdasarkan implementasi kebijakan Rusia di Asia Tengah terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan kebijakan tersebut yaitu faktor sejarah dan budaya, faktor ekonomi dan faktor politik.

A. Faktor Sejarah dan Budaya

Dari sisi sejarah dan budaya, kebijakan luar negeri Rusia dipengaruhi oleh kejayaan yang pernah dimiliki pada masa lalu. Pada periode Kekaisaran dan Uni Soviet, politik luar negeri ditunjukkan oleh elit politik pemerintah yang ingin menjadikan Rusia sebagai pemimpin. Pemerintahan yang otoriter kemudian berhasil menguasai wilayah Eurasia (Kaukasus, Asia Tengah, Timur Jauh) dan dilanjutkan oleh Uni Soviet yang mampu menguasai Eurasia selama kurang lebih tujuh puluh tahun. Dipengaruhi kejayaan yang pernah dimiliki pada masa kekaisaran dan Uni Soviet, Rusia ingin mendapatkan kembali status “great power” yang pernah dimiliki pada masa lalu, salah satunya dilakukan dengan memulihkan posisinya dengan negaranegara eks-Soviet. Dalam hal ini faktor sejarah dan budaya memiliki keterkaitan dalam pembentukan identitas Rusia dan termasuk bagian dari kepentingan nasional yang kemudian membentuk kebijakan Rusia di kawasan Asia Tengah

B. Faktor Ekonomi

Pasca Uni Soviet bubar, Rusia mewarisi permasalahan ekonomi dan politik peninggalan Uni Soviet. Di bawah kepemimpinan Boris Yelstin upaya perbaikan kondisi dalam negeri dilakukan melalui kebijakan ekonomi dengan program kebijakan berupa: stabilisasi ekonomi (berdasarkan kebijakan moneter, kredit ketat dan pengutan nilai mata uang rubel), liberalisasi harga, privatisasi perusahaan milik negara, reformasi sistem pajak dan perbankan. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut belum berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Rusia hingga Boris Yelstin mengundurkan diri pada tahun 1999. Pada tahun 2001-2008, perekonomian Rusia secara signifikan mengalami perkembangan. Hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dunia untuk ekspor utama Rusia

(minyak bumi dan gas) serta pelaksanaan reformasi sosial dan ekonomi yang meliputi (pajak, perbankan, lahan/pertanahan, ketenagakerjaan). Akibat kondisi perekonomian yang terus membaik, pada pertengahan tahun 2008 cadangan defisa Rusia hampir mencapai 600 miliar dollar US (terbesar ketiga di dunia)

Keadaan ekonomi yang membaik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia di negara-negara eks-Soviet, dalam hal ini termasuk hubungannya dengan negara di Asia Tengah. Dengan ekonomi yang baik Rusia dapat menunjukkan posisinya dan menjadi salah satu pasar potensial bagi negara di kawasan

C. Faktor Politik

Dari segi politik, Kebijakan luar negeri Rusia di Asia Tengah dipengaruhi oleh tujuan untuk memperluas pengaruh di negara-negara eks-Soviet. Di kawasan Asia Tengah, Rusia menginginkan adanya hubungan khusus dengan posisinya adalah sebagai negara pemimpin. Dalam rangka mencapai hal tersebut, salah satunya dilakukan dengan berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Kondisi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan. Terganggunya stabilitas keamanan dapat memberikan dampak bagi negara di luar kawasan seperti adanya penyebaran perdagangan obat terlarang yang melewati perbatasan Asia Tengah dan dapat menyebar ke luar kawasan termasuk Rusia yang memiliki kedekatan geografi dengan negara di Asia Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Rusia dan negara di Asia Tengah aktif melakukan kerjasama

menjaga keamanan yang salah satunya dilakukan dengan menjaga perbatasan negara-negara di kawasan. Selain Rusia, stabilitas keamanan kawasan ini juga menjadi kepentingan Amerika Serikat yang keberadaannya semakin terlihat pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001. Dalam rangka melawan gerakan terorisme negara-negara di kawasan ini mendukung kebijakan war on terrorism AS dan mengizinkan sebagian wilayahnya digunakan dalam rangka perang melawan terorisme di Afganistan. Keterlibatan aktor lain di kawasan ini memberikan reaksi dan perubahan terhadap kondisi domestik kawasan. Bagi negara-negara di kawasan kerjasama ini menjadi penting karena dapat membantu mengurangi ketergantungan pada Rusia, Sementara itu dari perspektif Rusia adanya aktor-aktor tersebut dapat mempengaruhinya dalam memperluas “pengaruh” di kawasan”. Untuk menjaga Asia Tengah berada dalam lingkup pengaruhnya, Rusia berusaha mempertahankan posisinya dengan aktif dan memaksimalkan perannya melalui kerjasama ekonomi dan keamanan yang dilakukan secara bilateral. Selain itu Rusia juga melakukan kerjasama secara multilateral seperti melalui CSTO (The Collective Security Treaty Organisation) maupun melalui EuRAsEC (The Eurasian Economic Community) dimana dalam organisasi tersebut melibatkan Rusia dan negara di kawasan.

5.3.2 Uni Eurasia

Uni Eurasia adalah politik luar negeri Rusia bertujuan untuk mempersatukan kembali wilayah bekas Uni Soviet menjadi satu kesatuan Eurasia. Pembentukan Eurasia telah menjadi inti arah kebijakan luar negeri yang dikampanyekan oleh Vladimir Putin sejak periode pertama, kedua sampai sekarang periode ketiga

kepemimpinannya. Implementasinya ialah Rusia menginisiasi pembangunan pemukiman Rusia yang memiliki sasaran untuk reunifikasi seluruh orang-orang Rusia dan Slavia Timur, Belarus, Utara Kazakstan dan Utara Siberia (O' Loguhlin, John & Talbot, F. Paul, 2005)

Adapun beberapa peran politik dan keamanan yang telah dilakukan Rusia demi mencapai kepentingannya di kawasan Asia Tengah yaitu:

1. Stabilisator

Pasca memerdekakan diri, kondisi politik dan pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tengah belum stabil, karena terjadinya proses peralihan dari yang dulunya sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Selain itu, negara-negara di Asia Tengah juga menghadapi masalah pencaharian identitas baru, perbaikan ekonomi, dan infrastruktur dalam negeri masing-masing.

Pada masa pemerintahan Vladimir Putin, terdapat perubahan cara pandang dalam menangani negara-negara anggota CIS. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan orientasi kebijakan luar negeri Rusia yang mana mengarah pada peningkatan dan pengembangan integrasi dengan negara-negara anggota CIS sebagai prioritas utama Rusia. Kesepakatan CIS, dimanfaatkan Rusia untuk mempengaruhi negara-negara Asia Tengah dalam mewujudkan integrasi Eurasia. Rusia di era Putin, selalu melancarkan manuver politik internasional berupa diplomasi dengan aktor-aktor negara di Asia Tengah secara tertutup dan rahasia. Salah satu manuver politik yang berhasil dilakukan oleh Putin yaitu kerjasama EAEU yang dibangun berdasarkan prestasi *Eurasian Customs Union* (EACU) dan Single Economic Space (SES) (Nofita Andes Nurdiana, 2019)

2. Sebagai Katalisator

Dalam keterlibatannya di kawasan, Rusia berupaya untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara tetangganya tersebut. Kondisi Asia Tengah yang masih belum bisa dikatakan sejahtera atau maju terlihat dari masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan salah satunya seperti negara Kyrgyzstan dengan angka sebesar 32.1%, Tajikistan 32.0% dan Uzbekistan 12.8% (*ADB Basic Statistic 2017, Economic Research and Regional Cooperation Departement*).

Kondisi tersebut membuat Rusia aktif terlibat dalam peningkatan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut, dengan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Salah satu kerjasama ekonomi yang dilakukan adalah *The Eurasian Economic Union* (EAEU). EAEU yang didirikan pada bulan Januari 2015, diproklamkan oleh Vladimir Putin, yang juga sebagai promotor utama proyek ini. Kerjasama ini didasari pada pengembangan kerangka kerja berbasis peraturan fungsional untuk dipromosikan, hubungan ekonomi yang lebih dalam antara anggota EAEU, dan dengan demikian mengintegrasikan negara-negara ke dalam entitas ekonomi kohesif baru di wilayah pasca-Soviet. Kerjasama ini beranggotakan negara-negara bekas Uni Soviet yaitu Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan Tajikistan. Tercatat total luas wilayah EAEU lebih dari 20 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk melebihi 180 juta orang dengan masing-masing perkiraan PDB sekitar US\$ 4 triliun di tahun 2013 (yang didasarkan pada kriteria kesetaraan daya beli masyarakat) (Nofita Andes Nurdiana, 2019, p. 161)

3. *Leading State* di kawasan

Rusia sebagai leading state di kawasan memainkan peran yang signifikan dalam proses memimpin integrasi Eurasia. Survey opini publik yang dilakukan *Integration Barometer* menunjukkan Rusia secara konsisten dipandang sebagai pemersatu negara-negara CIS. Negara CIS percaya bahwa kepentingan nasional negara anggota yang berpartisipasi dalam integrasi Eurasia akan diakomodir oleh Rusia. Kebanyakan mayoritas negara republik pasca Soviet bergantung pada Rusia dalam hal solidaritas politik dan bantuan militer (*Integration Barometer, Center for Integration Studies, Eurasian Development Bank, Moskow, 2012-2013*). Dapat diamati secara luas dalam hubungan internasional, negara-negara kuat seperti Rusia membentuk organisasi dengan negara-negara anggota yang lemah dikarenakan kecenderungan mereka dari negara-negara lemah untuk sepakat dengan keputusan atau kebijakan dengan negara dominan. Dalam hal ini Rusia sebagai negara dominan mendapat keuntungan untuk merealisasikan kepentingannya melalui penyelarasan kebijakan diantara anggota tersebut.

Peran-peran yang telah dijalankan di atas, menunjukkan bahwa Rusia memang memegang kendali secara politik di kawasan Asia Tengah. Peran Rusia yang tergambarkan sebagai tindakan untuk menanamkan dan memperluas pengaruhnya agar dapat mengontrol negara-negara tetangga, khususnya negara-negara di kawasan tersebut demi mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini menempatkan Rusia sebagai negara super power ketika dihadapkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah, meskipun untuk sekala Eropa Rusia masih di level menengah.

5.3.3 Neo-Eurasianisme Sebagai Kebijakan Strategis Rusia

Teori neo-eurasianisme menjelaskan keterfokusan pada konsep great power dan kemakmuran melalui pendekatan geopolitik kawasan Eurasia –Eropa dan Asia– sebagai kawasan sentral dunia. Jika dikaitkan dengan konsep geopolitik, terdapat dua teori geopolitik yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan dengan teori Eurasianisme, yakni *heartland theory* oleh Mackinder dan *rimland theory* oleh Nicholas J. Spykman. Berdasarkan teori *heartland*, dunia terbagi menjadi tiga wilayah, yakni satu, *world-island* meliputi Eropa, Asia, and Afrika; dua, *offshore island* meliputi Inggris (*great britain*) dan Kepulauan Jepang; dan tiga, *outlying island* meliputi kontinental Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Sedangkan *heartland* yang dimaksudkan dalam teori ini adalah Rusia.

Secara tersirat, dua teori ini menyatakan bahwa wilayah Eurasia memiliki letak yang strategis untuk dikuasai dan didominasi. Dominasi wilayah, sumber daya dan penduduk (masyarakat) di Eurasia menjadikan suatu negara mendominasi dunia. Upaya dominasi di wilayah Eurasia tersebut akan menjadikan suatu negara menjadi great power dunia karena ketika suatu negara mendominasi wilayah Eurasia maka negara tersebut mengontrol dunia. Rusia menggunakan konsep geopolitik ini sebagai justifikasi dari tindakan eksternalnya berdasarkan teori eurasianisme. (Anton Shekhovtsov & Andreas Umland, 2009)

Teori *heartland* dan *rimland* menyatakan wilayah Rusia strategis sebagai jembatan antara Eropa dan Asia yang menguntungkan Rusia secara tidak langsung. Hal tersebut dijadikan Rusia sebagai upaya mendominasi wilayah Eurasia yang diperkuat dengan teori eurasianisme yang berkembang pada tahun 1980-an. Teori tersebut menggunakan konsep geopolitik yang membagi wilayah dunia berdasarkan empat wilayah yakni wilayah pertama Eropa dan Afrika yang terdiri dari Uni Eropa,

Islam-Arab Afrika dan wilayah sub-tropis Afrika; kedua wilayah Asia Pasifik yang terdiri dari Jepang, negara-negara Asia Timur dan Indochina, Australia dan Selandia Baru; yang ketiga wilayah Eurasia yakni Rusia dan negaranegara *Commonwealth of Independent States* (CIS) India, dan Cina; dan keempat wilayah Amerika yakni Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Teori neo-eurasianisme ini menjelaskan terdapat kepentingan politik dan keamanan yang digunakan oleh Rusia melalui kawasan Eurasia sebagai poin strategis kebijakan luar negeri. Rusia menggunakan kawasan Asia Tengah sebagai alat strategisnya secara geografis, politik, dan keamanan wilayah untuk mengamankan wilayahnya dan membantu upaya Rusia memainkan peran sebagai negara great power di dunia internasional melalui upaya dominasi Rusia di kawasan *post soviet state*.

Tujuan Politik Rusia menurut konsep Neo-Eurasianis adalah untuk mengintegrasikan benua Eurasia, spesifiknya melalui reintegrasi bekas wilayah Uni Soviet menjadi suatu ruang yang terunifikasi, dengan Rusia, yang memiliki distingsi geografis, menempati posisi pemimpin. Tujuan politik tersebut juga menghadirkan konsep *outgroup* dan *ingroup* utama, yakni Atlantisis sebagaimana direpresentasikan oleh AS, sebagai *outgroup* yang secara umum ditentang Rusia, dan Eurasia, sebagai *ingroup* yang diaspirasikan oleh Rusia. (Athaya Aushafina, p. 12)

5.4 Konflik Kepentingan AS – Rusia di Kaukasus

Sebagai negara pemenang perang dingin, AS tentu tidak ingin tersaingi oleh hegemoni Rusia di Asia Tengah dan Kaukasus. Sangat kentara bagaimana AS mengawal dan mengawasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Rusia yang ingin

kembali menyatukan beberapa wilayahnya di Kaukasus Selatan pada 1992, dicegah oleh AS. Dengan satu-satunya kebijakan AS di Kaukasus, AS mendukung penuh kemerdekaan negara-negara baru yang merdeka tersebut.

Selain itu, AS juga memberikan bantuan kepada negara-negara ini secara rutin dengan jumlah yang signifikan. Pada umumnya AS memberikan pemerintahan yang didukungnya yang kemudian mengerjakan proyek pembangunan yang mendekatkan AS dengan negara-negara tersebut. Pada negara yang mempunyai pemerintahan yang tidak pro-Amerika, AS cenderung memberikan bantuan itu kepada lawan politiknya guna dengan sesegera mungkin menggantikan kekuasaan rejim. Seperti yang terjadi di Nagorno-Karabakh, ketika AS tidak berkenan dengan pemerintah Azerbaijan karena melakukan blokade terhadap Armenia maka AS serta menghentikan bantuannya terhadap pemerintah Azerbaijan, tapi kemudian melanjutkannya terhadap tim oposisi politiknya. (Idham Badruzaman, 2010, p. 85)

Meskipun perang dunia dan perang dingin telah selesai, dan Amerika Serikat berhasil menjadi pemenang tunggal pada akhirnya, namun persaingan antara keduanya masih saja berlangsung pada kawasan Eurasia. Amerika Serikat dan Rusia bak kucing dan anjing yang mempunyai sejarah persaingan yang panjang. Walaupun perjanjian demi perjanjian telah disepakati atas keduanya, namun jiwa kompetisi antara dua kekuatan besar ini akan terus ada. Amerika Serikat dengan kekuatan 4 dimensinya meliputi Ekonomi, Militer, Teknologi dan Budaya terus menjalin komunikasi yang intensif terhadap negara-negara Eurasia termasuk daerah konflik Azerbaijan, Armenia dan Nagorno Karabakh. Sementara Rusia pun tidak kalah gencar melakukan koordinasi dengan negara-negara bekas soviet; pangkalan militer Rusia juga eksis di beberapa negara bekas Soviet tersebut, terutama pangkalan militer Rusia di Armenia. (Owen, David A, 2004)

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia terjadi karena kedua Negara telah lama berusaha menancapkan hegemoni mereka di kawasan Eropa. Amerika Serikat dan Rusia memang dikenal saling berebut kekuasaan di wilayah Kaukasus, baik AS dan Rusia berusaha menancapkan hegemoni mereka di wilayah itu. Kaukasus merupakan wilayah yang dianggap sangat vital bagi Rusia. Faktanya, Kaukasus adalah wilayah yang terdiri dari banyak kelompok etnis dengan latar belakang budaya, sejarah dan agama yang berbeda-beda. Rusia ingin menyatukan perbedaan itu, setelah kebijakan Stalin yang memindahkan populasi Rusia berdasarkan etnis-etnis yang ada di Rusia. (Handika Suhariyadi, 2012)

Kehadiran militer Rusia dalam bentuk basis-basis militer, pasukan penjaga perdamaian dan hubungan militer antar Negara-negara di kawasan kaukasus, merupakan indikasi yang sangat jelas betapa Rusia memandang penting wilayah ini. Kaukasus juga merupakan wilayah yang sangat vital bagi kepentingan energi Rusia. Pipa-pipa yang menyalurkan gas alam dan minyak bumi banyak yang melintasi kawasan Kaukasus-Rusia, dan pipa-pipa itu harus mendapat pengamanan. Sebagai konsekuensinya, stabilitas keamanan di wilayah ini menjadi penting untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan proyek-proyek pengangkutan hidrokarbon ke pasar Barat.

Rusia sebagai Negara yang dikenal mempunyai kekuatan militer yang besar telah menjadi lawan politik Amerika Serikat semenjak masih menyandang nama besar Uni Soviet. Namun, pasca perang dingin yang terjadi setelah perang dunia II antara 2 blok yang mendominasi dimasa itu, Blok Barat dan Blok Timur, hubungan antara AS dan Rusia sempat membaik disebabkan karena adanya kesamaan pandangan keduanya terhadap bahaya komunisme.

Dalam perjalanannya kemudian, hubungan antara kedua Negara kembali menunjukkan tanda-tanda ketidakakurannya dan kembali menghidupkan perselisihan lamanya. Selain karena pandangan ideologi yang berbeda diantara kedua Negara, perselisihan antara AS dan Rusia juga disebabkan karena langkah politik dan kepentingan kedua Negara tersebut kerap bersinggungan dan sangat berbeda jauh. Amerika Serikat, yang menyebut dirinya sebagai Negara *Super Power* atau Polisi Dunia kerap kali menginginkan agar Rusia mengikuti langkah politiknya dalam upayanya menancapkan dominasi di dunia. Dan Rusia, karena sebagai bekas Negara Adidaya dan menganggap diri sejajar dengan AS, Rusia juga mempunyai gengsi dan nilai tawar yang di tidak bisa diremehkan di dalam konstelasi politik dunia, terlebih lagi keduanya juga memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) (Handika Suhariyadi, 2012, pp. 55-58)

5.4.1 Pipa Minyak BTC di Nagorno-Karabakh

Berikut adalah gambar peta jalur minyak BTC, yang mengalirkan minyak-minyak dari Negara-negara penghasil minyak di Asia Tengah dan Eropa Timur yang kemudian disuplai untuk memenuhi kebutuhan minyak Amerika Serikat:

Gambar 5.1 Peta jalur minyak BTC



Sumber: (Anadolu Agency, 2021)

Pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan adalah 1.768 kilometer (1.099 mil) panjang pipa minyak mentah dari ladang minyak Azeri-Chirag-Guneshli di Laut Kaspia ke Laut Mediterania. Jalur-jalur pipa minyak ini menghubungkan Baku, ibukota Azerbaijan, Tbilisi, Georgia dan Ceyhan, sebuah pelabuhan dibagian tenggara Pantai Mediterania Turki, Pipa BTC ini adalah terpanjang kedua pipa minyak di Uni Soviet setelah pipa Druzhba. Minyak pertama yang dipompa dari ujung pipa Baku pada tanggal 10 Mei 2005 mencapai Ceyhan pada tanggal 28 Mei 2006. Bahkan sebelum selesai, pipa BTC itu berpengaruh pada politik minyak dunia.

Selama masa Uni Soviet, rute transportasi semua dari daerah Kaspia dibangun dengan jalur yang melewati Rusia. Runtuhnya Uni Soviet menginspirasi Rusia untuk mencari rute baru. Pada awal pembangunan jalur pipa BTC, Rusia bersikeras bahwa pipa baru harus melewati wilayah Rusia, tetapi gagasan ini ditolak oleh Negara pecahan Uni Soviet lainnya. Pada musim semi 1992 meletusnya

konflik militer di Nagorno-Karabakh, Perdana Menteri Turki Suleyman Demirel mengusulkan pada Negara Asia Tengah dan Azerbaijan agar jalur pipa tersebut melewati Turki.

Dokumen pertama pada pembangunan pipa Baku-Tblisi-Ceyhan telah ditandatangani antara Azerbaijan dan Turki pada tanggal 9 Maret 1993 di Ankara. Pada proposal pembangunan pipa ini, Turki meminta agar jalur minyak tersebut dibangun melewati Azerbaijan atau Armenia. Namun, rute melalui Armenia secara politis tidak mungkin karena perang yang belum terselesaikan antara Armenia dan Azerbaijan atas status Nagorno-Karabakh pada saat itu sedang berkecamuk perang. Hal ini yang menyebabkan rute Azerbaijan-Georgia-Turki memutar, meskipun itu lebih lama dan lebih mahal untuk membangun daripada pilihan lainnya (Handika Suhariyadi, 2012, pp. 85-86)

Proyek pipa BTC mendapatkan momentum setelah Deklarasi Ankara, diadopsi pada 29 Oktober 1998 oleh Presiden Azerbaijan Haidar Aliyev, Presiden Georgia Eduard Shevardnadze, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Presiden Turki Suleyman Demirel, dan Presiden Uzbekistan Islam Karimov. Deklarasi itu disaksikan oleh AS Menteri Energi Bill Richardson, yang menyatakan dukungan kuat untuk pipa BTC. Perjanjian antar pemerintah dalam mendukung saluran pipa BTC ditandatangani oleh Azerbaijan, Georgia dan Turki pada 18 November 1999, selama pertemuan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) di Istanbul, Turki. (OSCE, 1992)

Kaukasus Selatan, yang sebelumnya dipandang sebagai daerah kekuasaan Rusia, sekarang menjadi daerah strategis dengan sumber daya alam yang sangat signifikan dan *leverage*. AS dan Negara-negara barat lainnya telah terlibat lebih jauh dalam urusan tiga negara dimana minyak akan mengalir. Negara-negara seperti

Amerika Serikat dan Eropa telah berusaha untuk terlibat langsung sebagai penyeimbang bagi Dominasi ekonomi dan militer Rusia dan Iran di wilayah tersebut.

Para Ahli pertambangan Rusia mengklaim bahwa pipa jalur minyak yang tidak melewati Rusia akan melemahkan pengaruh Rusia di Kaukasus. Direktur Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Rusia, Konstantin Kosachev, menyatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya berencana untuk mengirim pasukan militer dan membangun pangkalan angkatan darat di Kaukasus dengan dalih ketidakstabilan di wilayah-wilayah yang dilewati pipa jalur minyak tersebut. (Handika Suhariyadi, 2012, pp. 64-67)

5.4.2 Kaukasus dan Laut Kaspia

AS bukan aktor tradisional di cekungan Kaspia dan baru-baru ini mengakui pentingnya kawasan itu. Namun, kepentingan geo-strategis Kaukasus Selatan dan kawasan Kaspia sebagai koridor dari Eropa ke Asia Tengah, sebagai jembatan untuk mengontrol dan menekan Iran, sebagai sumber sumber energi, serta perang melawan teror, adalah alasan utama kehadiran AS di wilayah tersebut. Masalahnya, keterlibatan AS baru-baru ini mungkin mengganggu keseimbangan kekuatan yang genting di kawasan itu, yang muncul setelah disintegrasi Uni Soviet. (Andrej Tibol & Vincent Cillesen, 2006, pp. 69-70)

AS telah memilih Azerbaijan sebagai sekutu terpentingnya di lembah Kaspia dan telah mengembangkan program kerja sama militer yang intens. Analisis militer Rusia berpendapat bahwa situasinya mengingatkan pada Program Kereta dan Perlengkapan AS-Georgia, yang dalam beberapa tahun singkat memberi Georgia tentara yang cakap, terlatih, dan diperlengkapi dengan baik. Para analis Rusia khawatir bahwa hal ini akan segera terjadi juga dengan Azerbaijan, dengan demikian

membuat Rusia kehilangan segala cara untuk mempengaruhi Azerbaijan. (S. Mamedov & A. Gordiyenko, 2005, pp. 1-2)

Kerja sama militer AS di Kaukasus Selatan dan Kaspia tampaknya berkembang dengan lancar. Meskipun AS memberikan kesan enggan untuk mengumumkan kehadiran dan kegiatan militernya, jelas bahwa AS secara efektif membela kepentingannya di kawasan, termasuk keamanan energi. Selain dukungan militer AS, anggaran pertahanan Azerbaijan yang meningkat juga akan sangat berkontribusi untuk memperkuat kekuatannya. Rusia telah menunjukkan minat serius untuk melestarikan otoritas regionalnya dengan armada Kaspianya. Tetapi dengan meningkatnya kehadiran AS, mereka perlu membentuk aliansi. Kekuatan maritim CASFOR yang dipimpin Rusia, termasuk negara-negara pesisir lainnya selain Iran, tampaknya masih jauh.

Penyebab potensi konflik adalah status hukum Kaspia yang tidak jelas. Sejauh ini negara-negara pesisir belum mencapai kesepakatan untuk membagi Laut Kaspia. Bentrokan bersenjata dekat telah terjadi antara Azerbaijan dan Iran atas ladang minyak yang disengketakan. Ketegangan kemungkinan akan berlanjut selama situasi hukum Laut Kaspia masih dalam sengketa. Karena kepentingan geo-strategis dan geo-ekonomi dipertaruhkan dan ketidakmampuan untuk menghasilkan konsensus dari kedua belah pihak, persaingan antara Rusia dan AS di Kaukasus dan Laut Kaspia diperkirakan akan bertahan di tahun-tahun mendatang. (Andrej Tibol & Vincent Cillesen, 2006, p. 70)

KESIMPULAN (Huruf kapital, Cetak Tebal/Bold, Arial 12, Rata Kiri)

Didukung fakta sejarah yang lama bahwa sebelumnya Nagorno-Karabakh tersebut masuk dalam wilayah kerajaan Armenia, maka penduduk Armenia tetap merasa Nagorno-Karabakh wilayah Armenia. Penduduk Armenia, tidak menerima

wilayah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan yang masuk dalam wilayah Republik Azerbaijan pasca kemerdekaanya pada 1918.

Namun pada 1992, eskalasi konflik berkembang menjadi peperangan militer antara Armenia dan Azerbaijan Pada saat kebijakan *Perestroika* dan *Glasnost* Gorbachev yang sudah semakin memuncak menjadikan negara-negara satelit Uni Soviet bersama-sama memerdekakan diri dari Uni Soviet yang membawa pada keruntuhan Uni Soviet. Armenia yang merdeka lalu melakukan kebijakan dengan melakukan agresi ke wilayah Nagorno-Karabakh sebagai langkah mengamankan warga Armenia dari pasukan Azerbaijan yang berada di dalam wilayah tersebut. Perang pun pecah antara Azerbaijan dan Armenia.

Agresi militer Armenia inipun mendapat kecaman dari dunia internasional melalui dewan keamanan PBB pada tahun 1993 melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 822 pada 30 April 1993 (U.S. Department of State Archive Websites, 1993)

Internasionalisasi konflik melalui berbagai pihak tidak hanya oleh Amerika Serikat, namun beberapa negara lainpun ikut terlibat ataupun menawarkan diri untuk terlibat seperti Rusia, Iran, Turki, dan Prancis. Realitas kedua negara yang termasuk dalam keanggotaan PBB dan juga sebuah organisasi regional yang berfokus pada kerjasama dan keamanan wilayah di antara negara-negara *Eropa yaitu Organization on Security and Cooperation of European* (OSCE) yang bertanggung jawab atas seluruh proses mediasi konflik antara Armenia dan Azerbaijan semakin membuat internasionalisasi konflik ini semakin luas.

Setidaknya terdapat tiga fase kebijakan AS terhadap Nagorno-Karabakh. Fase pertama adalah masa dimana AS hanya mempunyai motif penyebaran hegemoni di daerah konflik Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Dalam fase ini, tidak ada

belum ada kebijakan khusus untuk negara ini kecuali mendukung penuh kemerdekaannya melepaskan diri dari pengaruh Rusia

Fase kedua, adalah masa dimana AS mulai memberikan perhatian terhadap laut Kaspia karena temuan perusahaan minyak AS yang aktif mengeksplorasi kekayaan minyak dunia. Dalam fase ini, AS sudah mulai merumuskan kebijakan khusus untuk wilayah Kaukasus tersebut khususnya untuk Azerbaijan.

Fase ketiga adalah masa dimana AS melakukan hubungan kerjasama strategis dengan Azerbaijan namun bukan berarti langsung menunjukkan keberpihakan total pada Azerbaijan. Fase ketiga ini merupakan bukti kesuksesan lobi perusahaan minyak AS dalam meng-*counter* lobi Armenia yang sangat berpengaruh di kalangan kongres AS. di sisi ekonomi, AS diuntungkan dengan mendapatkan jaminan suplai minyak yang lebih dari cukup dari Baku.

Hal ini pula menjadi solusi bagi AS atau konfliknya dengan Iran dan ketergantungannya pada Teluk Persia. Selain itu, Azerbaijan menjadi tempat yang sangat strategis dalam meng-*counter* pengaruh hegemoni Rusia di Kaukasus.

Pasca bubarnya Uni Soviet, AS merasa menjadi satu-satunya kekuatan dunia. Sehingga setelah momentum besar tersebut, AS juga mempunyai kesempatan untuk melebarkan sayap hegemoninya di daerah Kaukasus dan Asia Tengah, termasuk daerah konflik Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Hal ini pula didasarkan pada upaya Rusia untuk merangkul kembali negara-negara bekas Soviet untuk kembali berada di pihaknya.

Asia Tengah dan Kaukasus adalah sumber daya alamnya yang melimpah, cadangan minyak dan gas bumi juga tambang emas terbesar di dunia. Lebih lanjut, kawasan ini merupakan jalan lintas strategis secara ekonomi, "Jalan Sutra" yang legendaris, yang menghubungkan China di Timur dengan Eropa di Barat. Hal inilah

alasan utama AS menanamkan pengaruhnya karena wilayah ini dianggap strategis untuk kepentingan nasionalnya dan secara geopolitik, AS berusaha mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh Rusia yang dominan di Asia Tengah.

Diktum Teori Geopolitik oleh Nicholas J . Spykman “*siapa yang menguasai Eurasia, maka akan menguasai takdir dunia*” sangat tepat untuk menganalisa konflik kepentingan AS-Rusia dalam Konflik Nagorno-Karabakh karena secara geografis, Armenia dan Azerbaijan merupakan dua negara yang berada di Eurasia, dengan potensi sumber daya alam sangat besar, Daerah Transkaukasus ini merupakan daerah yang dianggap penting dan strategis karena terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia.

REFERENSI

Buku

- Adrianus Harsawaskita. (2007). *Great Power Politic di Asia Tengah . Dalam Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frankel, J. (1980). *International Relations*. Jakarta: Sungguh Bersaudara.
- Galtung, J. (2007). *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu.
- Jack C Plano, R. O. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta.
- KJ Holsti. (1987). *International Politics*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Lexy J. Moeloeng. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Morgenthau, H. J. (1990). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Nezar Patria & Andi Arif. (2015). *Antonio Gramsci : Negara Dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- O'Callaghan, G. &. (2001). *International Relations: The Key Concept*. Dalam *The Key Concept* (hal. 21). London: Routledge.
- Priyono & Herman. (2017). *Geopolitik Geostrategis & Geoekonomi*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Robinson, T. W. (1969). *International Politics And Foreign Policy*. London: The Free Press.
- Rudi, T. M. (2002). *Studi Strategis, dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- A Garibov. (2015). *Caucasus International. OSCE and Conflict Resolution in the Post-Soviet Area: The Case of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict*
- Ahmad Zainal Mustofa. (2021). *Jurnal Politik PIR Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Analisis Kepentingan Rusia dan Turki Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan Tahun 2020*, 9.
- Alena Vysotskaya Guedes Viera. (2014). *"Ukraine's Revolution: "A Challenge to Russia's Eurasian Integration Project"*, 1.
- Anahit Shirinyan. (2013). *Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation. "Assesing Russia's role in efforts to resolve the Nagorno-Karabakh conflict: From perception to*

- Andrej Tibol & Vincent Cillesen. (2006). *Geo-Strategy in the South Caucasus. Power Plan and Energy Security of States and Organization.*
- Athaya Aushafina. (n.d.). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA. *Relasi Ide dan Praktik Geopolitik: Analisis Diskursus mengenai Kaitan Neo-Eurasianisme*, 12.
- Baran Z. (2002). The Caucasus: Ten Years after Independence. *Washington Quarterly*, 221-234.
- Carl Schreck. (2014). *Explainer The Nagorno-Karabakh Conflict*. RFERL.
- Dr. Eric S Edelman. (2010). Center for Strategic and Budgetary Assesments (CSBA). *Understanding America's Contested Primacy.*
- Ensi Adistya Kristiani. (2013). *Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012*, 25.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. (2017). Politik. *Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno-Karabakh*, 7.
- Faruk Yaman. (2000). U.S and Turkish Interest Concerning Oil Politics in the Caspian Sea Basin. In Y. Faruk, *U.S and Turkish Interest Concerning Oil Politics in the Caspian Sea Basin* (p. 37). Monterey - California: Naval Post Graduate School.
- Handika Suhariyadi. (2012, April 5). *Repository Universitas Muhammadiyah*. Retrieved February 18, 2022, from KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK RUSIA GEORGIA TAHUN 2008: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/676>
- Helsinki, Moshes and Akardy, More Stick, Less Carot. (2014). Russian Analytical Digest. *Policy Toward Ukraine*, 2.
- Hratch Tchilingirian. (1999). Central Asian Survey. *Nagorno-Karabakh: Transition and The Elite.*
- Inessa Baban & Zaur Shiryev. (1992). George Bush, " Statement on Signing the Freedom Support Act. Volume 9. *The U.S South Caucasus Strategy And Azerbaijan.*
- Jim Nichol , Jones, James Gen. (2005). U.S Senate Committe on Armed Services Testimony. *Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Security Issue and Implications for U.S Interest.*
- K.K Hedenskog. (2016). Swedish Defence Research Agency. *The Interest of Russia and Turkey in The Nagorno-Karabakh Conflict.*
- Lachin Sultanova. (2011, January 13). APA. Retrieved February 15, 2022, from APA: <http://en.apa.az/news/138256>

- Mappa, N. (1990). *Indonesian Relations With the South Pasific Countries; Prospec and Problems*. Makassar: UNHAS Makassar.
- Margarita Tadevosyan. (2010). *Journal of Conflict Transformation: Caucasus Edition Vol 3. Nagorno-Karabakh Conflict: War, Humanitarian Challenge, and Peace Keeping*, 1.
- Miftachun Niam & Amelia Zailani. (2011). *Sejarah Nagorno Karabakh Periode Pra Sejarah - Perang Nagorno Karabakh 1991*. Solo: FISIP Universitas Slamet Riyadi .
- N Caspersen. (2017). *Moving Beyond Deadlock in the Peace Talks*. In S. E. Cornell, *The International Politics of the Armenian - Azerbaijani Conflict*. New York: Palgrave Macmilan.
- Nicu Popescu. (2019). Chailot Paper No 132 European Union Institute for Security Studies. *Eurasian Union: The Real, The Imaginary and The Likely*, 9.
- Nofita Andes Nurdiana. (2019). Peran Politik dan Keamanan Rusia di Kawasan Asia Tengah. 159-163.
- Nur Indah Khairun Nisa. (2019). *UMY Repository*. Retrieved 1 7, 2022, from Research Repository: repository.umy.ac.id
- O' Loguhlin, John & Talbot, F. Paul. (2005). Where in the World is Russia? . In O. Loguhlin, *Geopolitics Perceptions and Preferences of Ordinary Russians* (p. 24). V.H Winston & Son Press.
- Owen, David A. (2004). *Geostrategy and US Hegemony: The Analysis of The Grand Chessboard and Beyond*. Thailand: University of Thai Chamber of Commerce.
- R Craig Nation. (2007). *Russian Security Strategy Under Putin: U.S and Russian Perspective, US Interest in the New Eurasia*, 1.
- Repository Univ Sebelas Maret. (2022, Januari 5). *ANALISIS KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK NAGORNO-KARABAKH: Studi Kasus September War 2020*. Retrieved Maret 15, 2022, from Repository Universitas Sebelas Maret: Downloads/681-Article%20Text-1724-1-10-20220104.pdf
- S. Mamedov & A. Gordiyenko. (2005, May 27). *Nezavisim oye Voyennoye Obozreniye*. Retrieved February 19, 2022, from 'U "kaspiyskogo strazha" poyavilsya khozyain': https://nvo.ng.ru/wars/2005-05-27/1_kaspiy.html.
- Serena Giusti & Tomislava Penkova. (2008, October). *ISPI Working Paper Issue*. Retrieved February 3, 2022, from Russia: Just a Normal Great Power: http://www.ispionline.it/it/documents/WP_34_2008.pdf

Stephen M. Walt. (2002). Naval War College Review LV no 2. *American Primacy: Its Prospects and Pitfalls*, 9-28.

Victoria Dementyeva. (2011, Juni 8). *APA: Russian Politics*. Retrieved February 15, 2022, from Russian Ambassador: As a result of the international efforts, there is a chance to reach serious: <http://en.apa.az/news/148983>

Welt, Cory and Andre S. Bowen. (2021). *Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh*. Congressional Research Servic.

Zbigniew Brzezinski. (1997). The Grand Chessboard. In B. Zbigniew, *American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. New York: Basic Books.

Media Online

Anadolu Agency. (2021, July 19). AA. Retrieved February 19, 2022, from Jalur pipa BTC alirkan 99 juta barel minyak: <https://www.aa.com.tr/id/info/infographic/24157#!>

Anjaiah, V. (2020, December 12). *Matamata Politik*. Retrieved 11, 2022, from Matamata Politik Berita Politik Dunia: <https://www.matamatapolitik.com/news/indonesia-mengutuk-kekejaman-armenia-terhadap-penduduk-sipil-azerbaijan>

Armeniagogo. (2018, March 20). *Nagorno-Karabakh Conflict History*. Retrieved 11, 2022, from Armeniagogo: <https://armeniagogo.com/nagorno-karabakh-conflict-history/>.

IDN Times. (2020, May 30). Dipetik December 19, 2021, dari www.idntimes.com/news/world/karl-gading-sayudha/mengenal-sejarah-armenia-vs-azerbaijan-konflik-alot-lampau-abad/5

Irena Sargsyan. (2003). *International Mediation in Theory and Practice: Lessons of Nagorno-Karabakh*. Retrieved February 9, 2022, from The Armenian Center For National and International Studies: http://pdc.ceu.hu/archive/00004733/01/INTERNATIONAL_MEDIATION_IN_THEORY_AND_PRACTICE.pdf

KOMPAS. (2014, February 3). *Geografi, Geopolitik, dan Geoekonomi*. Retrieved January 30, 2022, from Geografi, Geopolitik, dan Geoekonomi: <https://www.kompasiana.com/jouni-one/55300bf66ea83441148b45a5/geografi-geopolitik-dan-geoekonomi>

RBTH. (2012, November 12). *Rossiyskaya Gazeta*. Retrieved Maret 14, 2022, from Interfax, "Russia against Armenia plan to open airport in Nagorno-Karabakh – diplomat": http://rbth.ru/articles/2012/11/12/russia_against_armenia_plan_to_open_airport_in_nagorno-karabakh_-_di_20026.html

The Moscow Time. (2020, November 11). Dipetik December 19, 2021, dari www.themoscowtimes.com/2020/11/24/russian-peacemaker-wounded-in-deadly-nagorno-karabakh-mine-blast-a72127

Skripsi

Hanifah. (2014, May 13). *Repository UIN Syarif Hidayatullah*. Retrieved February 19, 2022, from Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Bidang Energi Di Asia Tengah Periode 2003-2010

Idham Badruzaman. (2010, August 9). *Repository.Umy.ac.id*. Retrieved 11, 2022, from UMY Repository: <http://repository.uly.ac.id/handle/123456789/4884>

Sutiono. (2014). Peran Amerika Menengahi Konflik Azerbaijan-Armenia.

Dokument pendukung dari situs resmi

Academia Edu. (n.d.). *Geopolitik Teori dan Kajian*. Retrieved Maret 14, 2022, from Academia Edu.com: [https://www.academia.edu/38210883/Geopolitik Teori dan Kajian pdf?auto=download](https://www.academia.edu/38210883/Geopolitik_Teori_dan_Kajian_pdf?auto=download)

Anton Shekhovtsov & Andreas Umland. (2009, September). *Is Aleksandr Dugin a Traditionalist? "Neo-Eurasianism" and Perennial Philosophy*. Retrieved Maret 14, 2022, from Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/229445632_Is_Aleksandr_Dugin_a_Traditionalist_Neo-Eurasianism_and_Perennial_Philosophy

Omics International. (2014). Dipetik 11, 2022, dari Omics International: http://research.omicsgroup.org/index.php/Armenian%E2%80%93Azerbaijani_border_conflict.

E-Government Armenia. (t.thn.). Dipetik December 14, 2021, dari General Information: <http://www.gov.am/favicon.ico>.

Helsinki Final Act. (1992). *Conference for Security and Co-Operations in Europe*. Helsinki.

Hendrajit. (2021, January 2). *Konflik Bersenjata Azerbaijan-Armenia Dalam Perspektif Strategis Geopolitik Kaukasus Selatan*. Retrieved 11, 2022, from The Global Review: <https://theglobal-review.com/konflik-bersenjata-azerbaijan-armenia-dalam-perspektif-strategis-geopolitik-kaukasus-selatan/>

Human Rights Watch . (1993). *Armenia*. Helsinki: Human Right Development. *Office of The Nagorno - Karabakh Republic*. (t.thn.). Dipetik December 19, 2021, dari www.nkrusa.org/nk_conflict/index.shtml

OSCE. (1992, March 24). *OSCE (Organization Security and Co-Operation in Europe)*. Retrieved February 6, 2022, from OSCE Minsk Group: www.osce.org

RFE/RL's Armenian Service. (2021). *Radio Armenian*. Dipetik August 11, 2021, dari Azatuyun: www.azatuyun.am/en

U.S. Department of State. (2021, December Sunday). Dipetik December 19, 2021, dari U.S. Department of State: www.state.gov

U.S. Department of State Archive Websites. (1993). *Official Website of The United States Government*. Retrieved February 21, 2022, from U.S Department of States: <https://www.state.gov/u-s-department-of-state-archive-websites/>

UNHCR. (2011). *UNHCR*. Retrieved 1 7, 2022, from The UN Refugee Agency: Www.unhcr.org

Wikipedia. (t.thn.). *Geostrategy in Central Asia*. Dipetik 1 11, 2022, dari Geostrategy in Central Asia: https://id.wikiup.wiki/wiki/Geostrategy_in_Central_Asia